BALAIRUNG
Mahasiswa Papua Terbelenggu Stereotip
EDISI 53/TH. XXXII/2017

Rumah Warna Café
OPEN
14.00-22.00 WIB
MAU CARI TEMPAT BUAT EVENT / NYANTAI?
JL. RINGROAD UTARA (BARAT KANTOR KEC. CONCAT)
GOOGLE MAPS : RUMAH WARNA CAFE
▶ KARAOKE ▶ MEETING ROOM ▶ LIVE MUSIC ▶ DLL
RESERVASI BISA VIA DM ATAU 0858 799 060 42
Contact Us : 0888 2719 795 | RumahWarnaCafe | CafeRumahWarna
D' PARAGON
JARINGAN GUESTHOUSE DAN KOST EKSKLUSIF TERBESAR DI INDONESIA
Fasilitas Lengkap
Full AC
Free WiFi
Kulkas
LED TV 32"
Jaringan TV Kabel
Full Furniture
Water Heater
Free Laundry
Parkir Luas
Kamar Mandi Dalam
Bangunan Baru dan Bersih
Harga Mulai
150Rb/ Hari 1,5Jt/ bulan
D'PARAGON
GUESTHOUSE DAN KOST EKSKLUSIF
WWW.DPARAGON.COM
Dparagon Kost
@DparagonKost
DPARAGONKOST
D'Paragon
Front Office
0813 2998 8000
0821 3718 6663
YOGYAKARTA-SOLO-SEMARANG-MALANG-SURABAYA-PALEMBANG-BANJARMASIN
Belajar di Jepang Perekrutan Beasiswa
✓ Beasiswa
✓ Dukungan masuk ke S2
✓ Perkenalan Sekolah Bahasa Jepang
Green Project
http://greenproject.asia/idn/
japan@greenproject.asia
butuh pelanggan baru?
ingin bisnis Anda digaungkan seantero UGM,
bahkan Jogja, dan seluruh Indonesia?
mari bekerja sama dengan
bppm balairung ugm
dalam bentuk:
iklan
event organizer
media partner
advertorial
hubungi kami:
+6287-8899-8050-5 (Efflin)
+6285-6292-3517 (Salsa)
balairungpress@gmail.com
@bppmbalairung
/bppmbalairungugm
@bppmbalairung
@GSJ9240C
/balairungpress.com
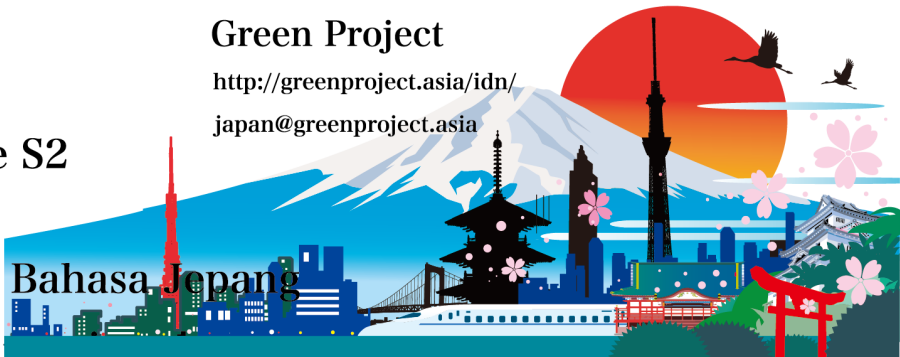
*selamat datang mahasiswa biasa*

DI

*kampus*

YANG

*biasa-biasa saja*

Filep Karma (2014) menulis buku berjudul *Seakan Kitorang Setengah Binatang* untuk menceritakan rasialisme yang dialami orang Papua. Ia mengatakan bahwa orang Papua sering menjadi korban ketika menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Menurut keterangan Filep, mereka ditangkap, diculik, dibunuh secara semena-mena oleh polisi dan tentara. Ia juga menuturkan bahwa para tentara memperkosa perempuan-perempuan di tempat mereka bertugas. Filep menjelaskan perlakuan kejam yang dialami oleh orang Papua ini didasari oleh rasialisme yang mendalam. Ia membenarkan bahwa orang Indonesia menganggap orang Papua dengan identitas Melanesia lebih rendah daripada identitasnya. Begitu rendahnya, hingga menurut Filep, hal tersebut dapat membenarkan pelanggaran hak asasi terhadap orang Papua. Oleh sebab itu, Filep juga mengatakan bahwa hampir seluruh masyarakat Papua diperlakukan seperti 'setengah binatang' di seluruh pelosok di negeri ini.

Salah satu daerah yang sering terjadi tindakan rasial terhadap orang Papua adalah Yogyakarta. Rasialisme hadir melalui tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua. Yogyakarta yang menjadi salah satu kawasan tujuan untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi adalah alasan banyaknya mahasiswa Papua yang tinggal. Sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat di sini, bahwa mahasiswa Papua relatif sulit mendapatkan indekos, hak-hak berpendapat mereka dibatasi dan kasus-kasus kriminal yang menimpa sebagai korban tidak diselesaikan dengan baik. Stereotip mahasiswa Papua sebagai pembuat gaduh, peminum, dan suka berutang, menjadi dalih untuk melakukan tindakan rasial tersebut.

Kejadian-kejadian rasial semacam itulah yang melatarbelakangi Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Balairung UGM (selanjutnya disebut Balairung) membuat majalah dengan tema "Tindak Diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua di Yogyakarta". Tema ini relevan dan kontekstual mengingat kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap golongan masyarakat tertentu masih terkesan ditutup-tutupi dan tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Sejumlah peristiwa kebudayaan, politik, dan akademik yang sengaja diadakan untuk menyuarakan hal ini kerap tak berjalan mulus, dan sering dilarang oleh beberapa pihak.

Oleh karena itu, di awal tahun ajaran ini, kami mempersembahkan Majalah Balairung Edisi 53 kepada mahasiswa baru. Tahun-tahun sebelumnya, produk ini bernama Balkon Spesial (Balspes). Meski mengalami perubahan nama, format isi majalah ini dibuat sama dengan Balspes sebelumnya. Melalui produk ini, kami berharap pembaca menyadari bahwa tindak diskriminasi dan intoleransi ternyata tetap ada dan terus berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sering diklaim sebagai daerah yang toleran. Sehingga, tindak diskriminatif dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harusnya dihentikan, bukan dilestarikan. Hal ini menjadi sangat penting, karena mahasiswa Papua, layaknya mahasiswa asal daerah lainnya, juga memiliki hak asasi untuk tetap hidup aman dan bebas berpendapat.

Tema mengenai rasialisme dan tindakan diskriminasi yang dialami oleh mahasiswa Papua ini dipilih dengan melibatkan empat divisi yang ada di Balairung. Empat divisi tersebut adalah Redaksi, Riset, Produksi dan Artistik (PdA), serta Perusahaan. Keempat divisi itu memulai bersama sejak diadakannya bursa tema pada bulan Mei untuk menampung aspirasi awak mengenai isu yang akan diangkat. Tema yang diajukan adalah isu-isu yang terjadi di ruang lingkup DIY yang akan diperdalam melalui tahap prareportase. Selanjutnya, hasil prareportase tersebut dimusyawarahkan untuk memperdalam isu-isu yang diangkat sebelum akhirnya dipilih melalui eksekusi tema.

Produk yang sedang Anda baca ini, bukanlah cara menyambut mahasiswa baru yang tanpa tujuan. Majalah ini dibuat dengan harapan pembaca menjadi kritis terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Khususnya dalam hal ini, mahasiswa sebagai kaum intelektual mampu memahami, mengambil sikap, dan terlebih menyuarakan ketidakadilan yang dialami masyarakat.

Akhirnya, selamat berdialektika!


**Pembina** Drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D. **Pemimpin Umum** Fazrin Haerussaleh **Koordinator Majalah Balairung** Ni Nyoman Oktaria Asmarani **Tim Kreatif** Citra Maudy Mahanani, Mirna Yusuf =, Nur Syafira Ramadhanti, Salsabila Amjad **Pemimpin Redaksi** Devananta Rizqi Rafiq **Editor** Ahmad Thovan Sugandi, Bernard Evan, Faizah Nurfitria, Indrabayu Selo, Luthfian Haekal, Nurrohman, Nizmi Nasution, Sitti Rahmania, Sultan Abdurrahman **Penulis** Abilawa Ihsan, Afal Ranggajati, Amirah Syukraini, Chitito Audhitio, Cintya Faliana, Hasya Nindita, Henny Ayu Amalia, Hutri Cika Agustina Berutu, Lailatul Zunaeva, Lukas Rainhard Sitohang, Margarete Theda Kalyca Krisandini, Maria Hana, Monica Bening Maeria Anggani, M. Irfan Hafidh, Rio Bagus Saputro, Sandy Maulana Yusuf **Kepala Riset** Risma Nur Majida **Editor** Dwiky Rama Yanuar, Kenny Setya Abdiel, Respati Harun, Unies Ananda Raja **Penulis** Ade Tri Widodo, Alnick Muhammad Nathan, Irsa Bayu Pradana, Jihadir Rahman, Nadya Imerelda Tambunan, Pamerdyaatmaja, Parasurama Ardi Tri Pamungkas, Salma Theofany, Yosefa Estri Ratna Tias **Pemimpin Perusahaan** Hannan Asrowi Efflina Lailufa **Staf Perusahaan** Alfi Triana Mufidah, Faruq Hakiki, Firda Rihatusholihah, Gloria Martha Kartikasari, Safira Hira, Vina Habibah **Kepala Produksi dan Artistik** Hamzah Ibnu Dedi **Kurator** Anindyo Frezio, Chandra Hadi, Dwiyana Lingga, Kurnia Putri Utomo, Marchyella Satyavita, Putu Tiara Lipcasani, Rama Shidqi Pratama **Fotografer** Arjun Pratiq Zamzamy Subarkah, Azizil Jabarri, Maulidya Rahmania **Ilustrator** Deny Reza Saputra, Isfi Afiannisa, M. Rusmul Khandiq, Nisa Nur Haniva **Layouter** Amar Ma'ruf Irfan, Andrea N. Khalis, Antonius Harya, M. Rohman **Ilustrasi dan Konsep Kulit Muka** Nisa Nur Haniva

**Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan dan Promosi**

Kompleks Perumahan Dosen UGM, Bulaksumur B-21, Kec. Depok,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia, Yogyakarta 55281

**Website**: www.balairungpress.com

**Email**: balairungpress@gmail.com

**Line**: @GSJ9240C

**Facebook**: BPPM Balairung UGM

**Twitter**: @bppmbalairung

**Instagram**: @bppmbalairung

# DAFTAR ISI

# Piraunya HAM dalam Masyarakat

© Nisa/BAL



Ada kesan getir pada revolusi yang berdalih pembebasan di *Animal Farm* (2005). Revolusi gagal, karena berakhir dengan penindasan sesama binatang. Prinsip "semua binatang adalah setara" sebagai salah satu sila dalam ideologi binatangisme yang termaktub dalam Tujuh Perintah versi pertama (*Ibid.* hlm. 24) diinjak-injak oleh tindakan pemimpin mereka sendiri. Di akhir cerita, Tujuh Perintah hanya menyisakan satu doktrin tunggal, "semua binatang setara, tetapi beberapa binatang lebih setara daripada yang lainnya" (*Ibid.* hlm. 133). Kamerad seperjuangan menjelma lawan.

Secara khusus, Orwell memang menulis tentang alegori Revolusi Oktober 1917 yang berakhir dengan matinya hak asasi. Namun, konteks itu bisa diperluas, karena memang tak jarang diktator yang jatuh dan rezim otoriter yang tumbang hanya digantikan oleh rezim anti-HAM lainnya. Semua rezim toh memiliki potensi konflik HAM-nya masing-masing. Dalih seperti kepentingan negara, kepentingan bersama, kepentingan yang lebih besar, dan ketidaksesuaian dengan ideologi negara sering digunakan untuk menindas minoritas. Prioritas untung-rugi utilitarianisme sebagai pengejawantahan prinsip "semua manusia setara, tetapi beberapa manusia lebih setara daripada yang lainnya" adalah kompromi.

HAM sebagaimana kita ketahui selalu merujuk kepada *Universal Declaration of Human Rights* yang bertitimangsa 10 Desember 1948. Kita membutuhkan norma tertulis untuk disepakati bersama. Hak yang dimiliki oleh setiap manusia disamakan sejak dilahirkan di dunia ini. Menurut Slavoj Žižek dalam bukunya *How to Read Lacan* (2006, hlm. 117), realisasi hak asasi yang universal haruslah jatuh menjadi sebuah laku kepercayaan murni (*pure belief*). HAM harus diyakini kebenarannya sejak awal sebagai

aksioma yang telah benar, sehingga tidak perlu dibuktikan secara praksis. Misal kita sejak awal haruslah meyakini bahwa semua orang memiliki hak yang setara. Kesimpulan itu tidak boleh dibuat dari pengalaman praktiknya. Jika didudukkan secara praksis, Žižek menulis, "Kesimpulan yang tak terelakkan adalah akan ada orang-orang yang secara fundamental berbeda, karena memiliki harga diri dan kebijaksanaan yang lebih dari yang lain." Penjaminan terhadap hak-hak individu dalam status ontologis HAM memang dan akan selalu ada di dimensi mengawang-awang.

Salah satu contoh dapat dilihat dari kisah Anwar Congo dalam film dokumenter *The Act of Killing* (2012) besutan Joshua Oppenheimer. Film ini mendokumentasikan proses seputar pembuatan film lain berjudul *Arsan dan Aminah* yang digarap Anwar Congo beserta teman-temannya dari Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Film fiksi tersebut diilhami pengalaman mereka dalam menjalankan pemusnahan ideologi komunisme dan para penganutnya pada 1965-66. *The Act of Killing* berhasil menangkap momen rekonstruksi pembunuhan, komentar dan pengakuan para pelaku sejarah ini mengenai apa yang mereka lakukan puluhan tahun silam. Seperti saat Anwar Congo mengaku telah membunuh seribu orang pada periode itu karena diminta oleh militer. Pembantaian itu dilakukan terhadap mereka yang benar-benar anggota Partai Komunis Indonesia, dan mereka yang hanya sekadar tertuduh.

Pada akhir film, Anwar Congo berkonfrontasi dengan kemanusiaan yang biasanya ia hiraukan. Suatu bentuk kenyataan yang memiliki istilah dalam psikoanalisis Lacanian sebagai *The Real* (*Le Réel*). Penonton disuguhi Anwar Congo dengan trauma yang menjadi-jadi, akibat rekonstruksi pembantaian yang dilakukannya sepanjang pembuatan film. Dalam rekonstruksi itu Anwar Congo berperan sebagai korban penyiksaan. Seolah-olah ia merasakan sendiri perbuatan keji yang ia dulu lakukan terhadap korbannya. "Apakah orang yang kusiksa dulu itu rasanya seperti aku begini? Tapi aku dapat merasakan mereka yang disiksa...semua rasa takut itu datang, nimbrung sekalian memasuki dalam tubuh," begitu komentarnya setelah menonton tayangan adegan penyiksaan yang ia alami.

Ia berkonfrontasi dengan pengalaman traumatiknya sendiri. Penonton dapat melihat Anwar Congo nampak tak lebih dari orang tua renta yang mau tak mau masih tersiksa dengan trauma oleh perbuatannya dahulu. Ia melakukan pengakuan terhadap penjagalannya, "Saya tahu bahwa pekerjaan itu salah." Setelah pengakuan tersebut, ia mulai terbatuk-batuk, seperti mual, seakan ingin muntah. Ia membuang ludah, kemudian ia memilih untuk duduk, mengambil nafas dan melanjutkan narasinya. "'Kita harus mematikan', hati nurani saya yang mengatakan harus dihabiskan," katanya lirih menggambarkan pergolakan batin sebelum menghabisi nyawa korban-korbannya.

Anwar Congo memelas. Kenyataan hidup sehari-hari Anwar Congo sebagai anggota Pemuda Pancasila yang nyaman dan terpandang menjauhkannya dari *The Real*, yaitu kemanusiaan yang terselubung dalam trauma. Sesuatu yang absen dalam ranah kehidupan simbolik sehari-hari yang dialami oleh Anwar Congo. Proses penggarapan film tersebut, berhasil membangkitkan kemanusiaan dalam diri Anwar Congo. Pertanyaannya, apakah Anwar Congo masih berhak memiliki kemanusiaan dan dikasihani setelah perbuatan keji yang ia lakukan dahulu?

Kepercayaan terhadap HAM tidak membutuhkan hitung-hitungan kepantasan. Hal inilah yang membuat HAM itu sendiri rancu. Penonton *The Act of Killing* bisa menanyakan rasa kemanusiaannya sendiri setelah mengetahui kisah Anwar Congo. Mana yang lebih mendukung kemanusiaan, apakah mengadili atau memaafkan Anwar Congo? Dari contoh kasus ini, kita bisa melihat bahwa pemaknaan kemanusiaan setiap individu secara khusus dan masyarakat sering terlepas dari dimensinya sebagai kepercayaan murni, dan tereduksi kepada perdebatan praksis benar-salah.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak bisa mendudukkan hal yang universal seperti HAM. Sebab masyarakat sendiri bukanlah suatu kenyataan objektif pula. Ernesto Laclau dalam *New Reflections on the Revolution of Our Time* (1990, hlm. 127) menulis, "Masyarakat tidak akan pernah dapat menjadi masyarakat, karena semua yang ada di dalamnya tertekan oleh batasannya sendiri yang mana mencegahnya untuk membentuk dirinya sendiri sebagai realitas objektif." Masyarakat terus berubah, karena nilai dan norma dalam masyarakat tercipta dari berbagai percobaan dan kesalahan. Masyarakat bukan totalitas, ia merupakan kontingensi, bukan aksioma seperti HAM.

Kemudian, masihkah kita dapat percaya kepada HAM dalam zaman dan masyarakat yang terus bergerak saat ruang publik dipenuhi oleh kemunafikan? Ada pihak yang mengaku toleran terhadap ras dan agama minoritas, tapi mengolok-olok kaum miskin kota yang tergusur dari tempat tinggalnya. Ada universitas yang mendukung hak kebebasan berpendapat, tapi tidak untuk urusan seksualitas dan ekspresi gender. Pemerintah Indonesia mengaku sebagai pendukung HAM, tapi mematikan kebebasan pers di Papua. Kota Yogyakarta mengaku sebagai kota yang santun dan toleran, tapi membiarkan ormas melakukan kekerasan di jalanan yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Pembaca, apa yang kami sajikan di sini tidak bertujuan muluk-muluk untuk memberikan penyadaran terhadap pembaca untuk kembali percaya kepada HAM seperti yang Žižek anjurkan. Sebab, kerja pers adalah sebuah komitmen terhadap kebenaran. Maka, dengan informasi yang didapat tersebut, pembaca berhak untuk memutuskan apa tindakan terbaik yang dapat ia lakukan dalam merespons isu yang ada. Pers menjadi yang terdepan untuk memberitakan bahwa ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi dalam masyarakat. Pelanggaran HAM tidak bisa didiamkan, sehingga harus diberitakan apa adanya sebagai suatu fenomena dalam masyarakat yang berubah. Maka, para pembacalah yang perlu menjawab, dan memutuskan, apakah dirinya ingin menjadi bagian dari masalah atau menjadi solusi.

Akhirnya, selamat membaca dan mencari jawabannya! **[Pemimpin Redaksi]**

# Mahasiswa Papua Terbelenggu Stereotip

© Rusmul/BAL
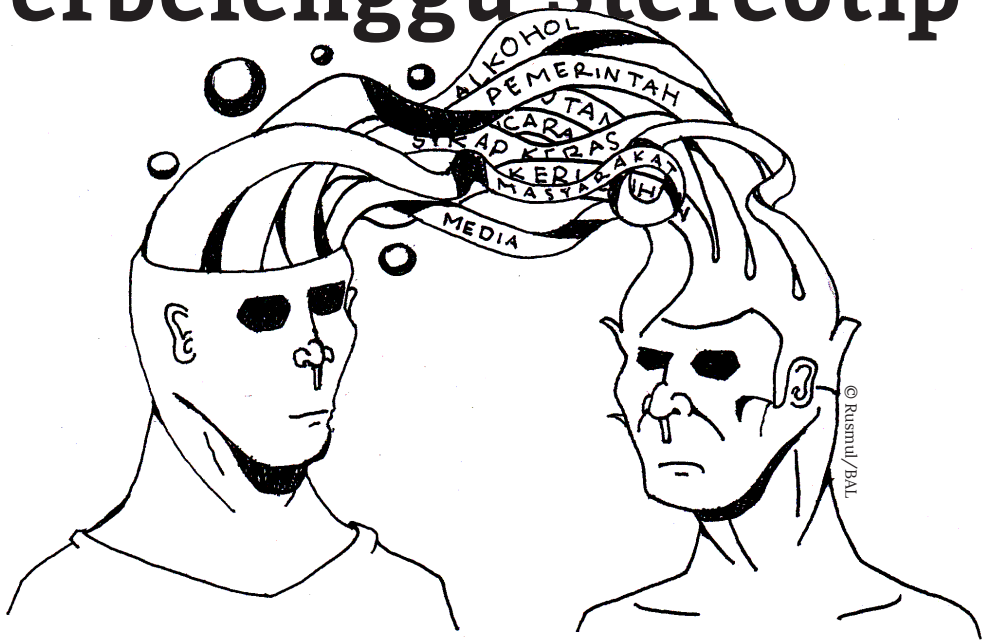
*Adanya stereotip terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta menyebabkan pola interaksi yang tidak harmonis di masyarakat. Berbagai elemen turut berperan dalam melanggengkan kondisi tersebut.*



Lembaga Studi Realino menjadi latar tempat saat Benediktus Fatubun, mahasiswa Pendidikan Sejarah '14 Universitas Sanata Dharma, menceritakan pengalamannya berkuliah di Yogyakarta. Benfa, begitu ia akrab disapa, adalah satu dari sekian ribu pemuda Papua yang memilih melanjutkan pendidikan tinggi di Yogyakarta. Ia menyebut biaya hidup yang murah sebagai salah satu pertimbangannya. Benfa tidak sendiri, jauh sebelum ia datang, ribuan abang-abangnya telah terlebih dahulu meneruskan kuliah di kota pelajar. Aris Yeimo, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Yogyakarta, menuturkan di sekitar tahun 1960-an sudah ada mahasiswa asal Papua yang datang ke Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi Papua kemudian memberikan fasilitas berupa asrama sebagai tempat tinggal mahasiswa Papua selama berkuliah di Yogyakarta. Salah satu asrama tersebut adalah Asrama Kamasan. Aris mengatakan bahwa setiap tahun setidaknya terdapat seratus mahasiswa Papua yang melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Mahasiswa baru dapat memilih tinggal di asrama atau mencari *kos-kosan* sendiri. Meskipun begitu, kehadiran mahasiswa Papua belum sepenuhnya diterima masyarakat Yogyakarta.

Salah satunya dialami Lasno, Ketua RT 18 RW 06 Semaki, RT yang terletak di sebelah barat Asrama Kamasan. Lasno mengungkapkan, warga RT-nya kadang terganggu dengan keberadaan mahasiswa Papua di lingkungan mereka. "Mereka itu suka mabuk-mabukan, makanya warga *nggak* mau *nerima*. Suka bawa banyak teman juga, bikin gaduh lingkungan," keluhnya. Monica Maria Nauw, dosen antropologi Universitas Negeri Papua, menyebut hal ini dipengaruhi oleh perbedaan budaya yang mencolok antara mereka yang berasal dari Papua dan orang-orang yang tinggal di Jawa. Ia mengatakan bahwa misalnya, gaya bicara orang Papua cenderung keras sementara orang Jogja berbicara lebih lembut.

Monica yang juga mahasiswi S2 Antropologi UGM ini pun menggarisbawahi perilaku orang Papua yang mengonsumsi minuman beralkohol. Ia menjelaskan, sebelum diberlakukannya peraturan daerah mengenai larangan minuman keras di Papua, penjualan minuman beralkohol dilakukan secara bebas. Dalam wawancara dengan *terkini.com* (14-05), Filep Karma, seorang aktivis kemerdekaan Papua, mengungkapkan bahwa alkohol memang dapat menjadi alat untuk menindas kaum atau kelompok tertentu. "Amerika menindas warga Indian dengan alkohol. Begitu juga dengan Australia terhadap warga Aborigin. Saya tidak mau itu terjadi di Papua," ujar Filep Karma.

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol tidak lantas berhenti di Papua. Aris berkata, umumnya mahasiswa Papua yang baru datang ke Yogyakarta masih sulit mengontrol kebiasaan tersebut. Ia turut menyayangkan jumlah tempat penjualan minuman beralkohol di Yogyakarta yang tidak mampu dikontrol oleh pemerintah. Bahkan, beberapa di antaranya dijual di tempat-tempat yang terbuka dan mudah diakses oleh umum.

Secara pribadi, Aris mengakui bahwa perilaku mabuk-mabukan, suka membuat gaduh, senang tidak bayar makan dan telat bayar *kos-kosan* memang masih kerap dilakukan mahasiswa Papua. Namun, ia menegaskan bahwa ini hanya perilaku oknum, bukan keseluruhan entitas mahasiswa Papua. "Apabila mereka melihat satu oknum mahasiswa Papua yang mabuk dan beranggapan oknum ini mewakili semua mahasiswa Papua, itu yang salah. Tidak semua orang Papua suka minum," tegasnya.

Hanya saja, Inung, Ketua RT 13 RW 04 Miliran, RT yang terletak di belakang Asrama Kamasan, menyebut stereotip tersebut terlanjur menjadi pandangan umum yang dianut masyarakat Yogyakarta. Benfa misalnya, menceritakan pengalamannya saat ia dahulu kesulitan mencari *kos-kosan* karena latar belakangnya yang berasal dari Papua. Benfa mengungkapkan para pemilik *kos* yang menolak mahasiswa Papua biasanya memiliki pengalaman traumatis tertentu. "Ibunya bilang *nggak* terima mahasiswa Papua karena biasanya rusuh *gitu*, *nggak* bayar *kos* terus kabur," cerita Benfa.

Penolakan terhadap mahasiswa Papua dalam mencari *kos-kosan* bukan murni berasal dari keinginan pemilik kos semata. Inung mengungkapkan bahwa pemerintah juga memiliki andil dalam penolakan ini. Ia menceritakan mengenai anjuran dari pemerintah kota Yogyakarta kepada pemilik kos untuk menolak kehadiran mahasiswa Papua di *kos-kos* mereka. "Kata pemerintah, kalau ada orang Papua disuruh masuk asrama saja biar tidak menyulitkan warga kalau bikin rusuh atau bikin kekacauan," tutur Inung.

Benfa juga menambahkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk stereotip terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta. Hal ini diamini oleh Manuel Kaisiepo, mantan wartawan senior *Kompas*. "Media kini telah menjadi institusi industri yang memiliki kepentingan masing-masing, sehingga wajar apabila ditemukan ketidakberimbangan informasi," ungkap Manuel. Baginya, saat ini sulit berharap media akan memberikan perhatian kepada hal-hal yang bukan menjadi kepentingan media itu sendiri.

Anang Zakaria juga menuturkan bahwa media memiliki peran yang besar dalam mengubah stereotip masyarakat mengenai mahasiswa Papua. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta ini turut menyoroti kecenderungan sebagian wartawan yang asal menerima informasi tanpa melakukan verifikasi ulang. Ia mengambil contoh mengenai menyebarnya kabar kericuhan yang berakhir dengan pembakaran mobil. Kericuhan tersebut terjadi setelah insiden pengepungan Asrama Kamasan pada pertengahan Juli 2016. Beberapa wartawan turut menyebar informasi tersebut tanpa mengecek kembali kebenarannya. Padahal, Anang yang sedari tadi di lokasi kejadian, tidak menemukan adanya insiden pembakaran mobil tersebut.

Selain itu, Yohannes Baru, selaku Ketua Asrama Kamasan, menduga ada pihak ketiga yang turut memperbesar stereotip ini. Pihak ini menaruh kecurigaan kepada mahasiswa Papua yang dianggap akan mengambil lahan pekerjaan mereka sebagai tukang parkir dan petugas keamanan kafe. Menurut Yohannes, pihak ini memperbesar stereotip tersebut agar lahan pekerjaan tetap dalam kendali mereka. Padahal menurutnya, kebanyakan mahasiswa Papua yang datang ke Yogyakarta hanya berkeinginan untuk kuliah, tidak ada kepentingan ekonomi yang mereka bawa. "Masyarakat kita itu mudah dipolitisi oleh isu-isu semacam ini," jelas Dr. Yoseph Yapi Taum, M. Hum., Wakil Pimpinan Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia Universitas Sanata Dharma.

> *"Kata pemerintah, kalau ada orang Papua disuruh masuk asrama saja biar tidak menyulitkan warga kalau bikin rusuh atau bikin kekacauan."*

Untuk mengurangi dampak negatif dari strereotip di masyarakat, Aris mengusulkan perlu adanya dialog yang menghadirkan elemen-elemen masyarakat Yogyakarta, staf pemerintah, dan mahasiswa Papua. "Seluruh stereotip yang ada di masyarakat mengenai kami, bisa kami jawab langsung di hadapan mereka, pemerintah Yogyakarta juga bisa tahu mengenai masalah ini," ujarnya. Ia yakin bila dialog-dialog seperti ini rutin diadakan, stereotip yang melekat pada diri mahasiswa Papua dapat luntur. **[Hasya, Rainhard, Sandy]**

# Motif Kepentingan Diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua

© Nisa/BAL
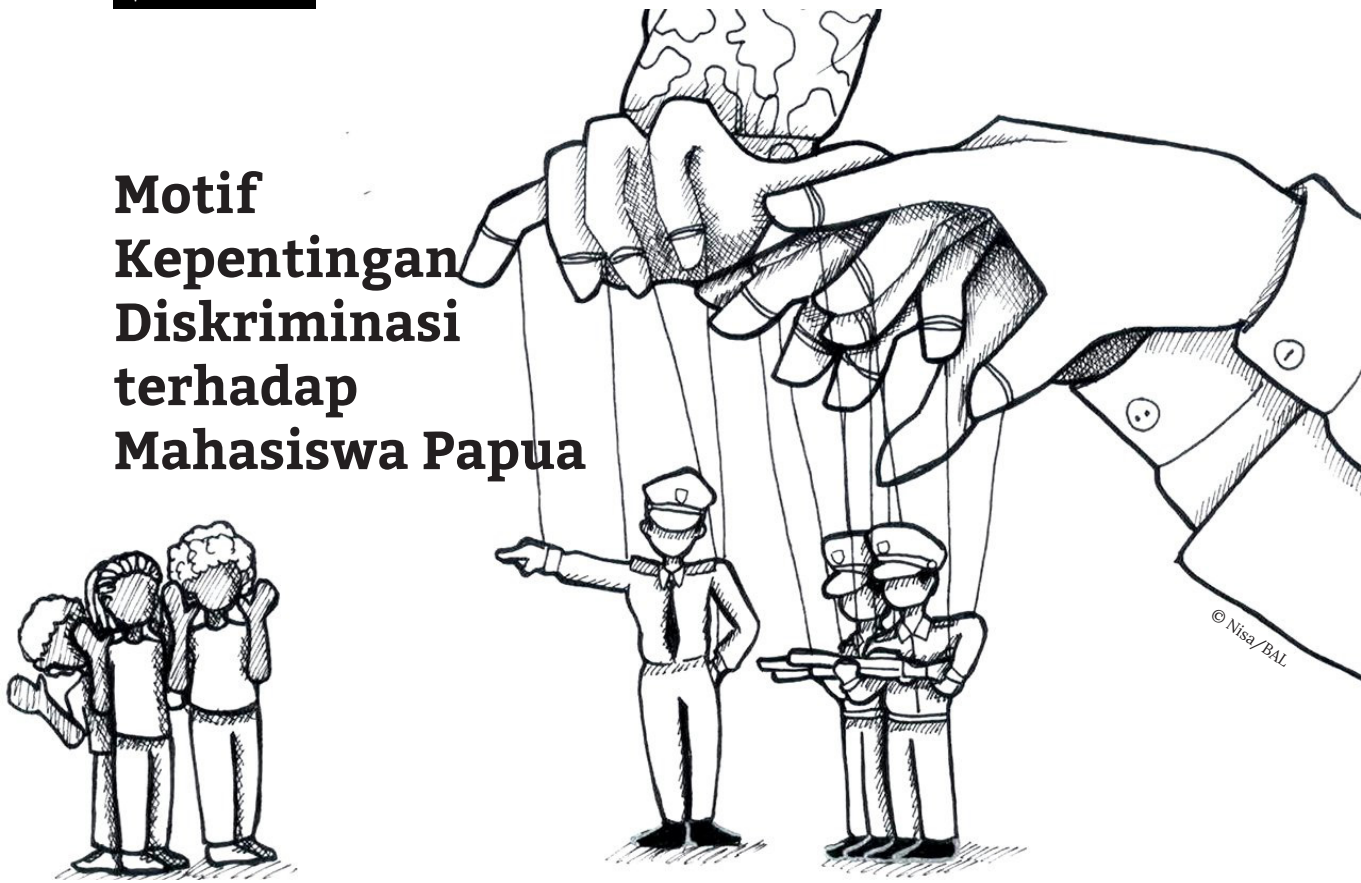


*Diskriminasi kepada mahasiswa Papua di Yogyakarta tidak muncul begitu saja. Stereotip sengaja dibangun di masyarakat dan dipelihara oleh mereka yang merasa teritorialnya terusik.*

Rabu pagi, 15 Juli 2016, ratusan polisi beserta pasukan brigade mobil tampak berjaga dan melakukan apel di depan Asrama Kamasan, Yogyakarta. Kurang lebih pukul delapan pagi, polisi bersama dengan beberapa organisasi massa (ormas) seperti Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Paksi Katon, Pemuda Pancasila (PP) dan ormas lainnya mulai melakukan pengepungan. Aparat juga telah menutup seluruh akses menuju ke Asrama Kamasan dan mengarahkan masyarakat Papua ke arah belakang asrama untuk pemeriksaan kendaraan.

Tak terkecuali Obby Kogoya, salah seorang mahasiswa Papua yang sedang mengenyam kuliah di Yogyakarta. Obby dan kelima kawannya menuju ke Asrama Kamasan untuk ikut serta dalam aksi longmars yang diinisiasi oleh Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat. Saat diperiksa, Obby tidak mampu menunjukkan surat-surat motornya karena surat yang dimaksud berada di Papua. Alhasil, motornya diamankan oleh polisi.

Obby yang tidak paham dengan situasi saat itu, lantas mengambil kembali motornya. "Tidak ada surat tilang. Selain itu, ada warga lain lewat begitu saja namun mereka tidak diperiksa, jadi menurut saya ini bukan razia," kata Obby. Namun, polisi menduga ia hendak melarikan diri. Akhirnya, Obby ditangkap dan dianiaya oleh beberapa orang berkaos oblong, jaket dan mengenakan celana jin. Pelaku penganiayaan terhadap Obby adalah massa yang ikut mengepung asrama.

Sayangnya, Obby justru dituding aparat kepolisian telah melakukan penyerangan terhadap polisi dan membawa senjata tajam berupa anak panah. Padahal setelah pemeriksaan lebih lanjut, Emanuel Gobay, S.H., selaku kuasa hukum Obby menuturkan bahwa tuduhan polisi atas dua hal tersebut tidak benar. "Tidak ada hasil visum yang membuktikan bahwa Obby melakukan kekerasan terhadap aparat," tutur pria yang kerap disapa Edo ini. Bahkan, lanjut Edo, saat ia mengklarifikasi barang bukti yang dituduhkan kepada Obby yaitu anak panah, polisi tidak dapat menunjukkannya. Justru yang ditemukan Edo adalah ubi yang akan digunakan untuk upacara bakar batu.

Kemudian, Edo memaparkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapat delapan temuan pelanggaran dalam kasus pengepungan di Asrama Kamasan. Kedelapan pelanggaran HAM tersebut adalah pembatasan

kebebasan berekspresi dan berpendapat, penyiksaan secara sadar dan sengaja yang dilakukan oknum polisi, serta tidak adanya jaminan kebebasan berpendapat. Pelanggaran selanjutnya adalah terjadinya kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme dan pembiaran yang dilakukan aparat keamanan atas tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh ormas.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya pengerahan pasukan kepolisian yang berlebihan dan penahanan delapan mahasiswa Papua dimana salah satunya ditetapkan sebagai tersangka tanpa alat bukti yang kuat. Pelanggaran kedelapan justru terjadi dari pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY, terkait penolakan gerakan separatis di Yogyakarta. Hal tersebut dirasa menyudutkan mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta.

Tindakan represif terhadap mahasiswa Papua, menurut Edo, tidak hanya terjadi di Asrama Kamasan saja, bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Menurutnya, hal tersebut ditengarai akibat tuntutan mereka dalam setiap aksi, yaitu Hak Menentukan Nasib Sendiri (HMNS). Tuntutan tersebut seringkali diartikan oleh beberapa oknum masyarakat sebagai upaya separatis. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Qholib Ginanjar, Ketua Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa PP, Sleman. “Kami protes karena pada dasarnya kami menjaga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak ada tawar menawar,” tegas Qholib.

Menanggapi pernyataan Qholib, Edo dengan lugas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa Papua terkait tuntutan HMNS merupakan pengimplementasian dari konstitusi. Undang-Undang (UU) pertama yang dirujuk Edo adalah UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Lalu, yang kedua adalah UU Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam dua UU tersebut, dijelaskan bahwa seluruh rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri baik dalam urusan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., Wakil Pimpinan Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, Universitas Sanata Dharma, membenarkan apa yang dituturkan oleh Edo. Menurut Yapi, sapaan akrabnya, tuntutan mereka terhadap HMNS adalah upaya untuk meluruskan rentetan kejadian sejarah atau *historical justice* proses integrasi Papua ke Indonesia.

Rentetan sejarah yang terjadi, menurut Yapi, diawali dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilakukan pada tahun 1969. Hasil Pepera dinilai tidak merepresentasikan seluruh pendapat rakyat Papua karena telah melanggar *New York Agreement* yang disepakati pada tanggal 15 Agustus 1962. Dalam kesepakatan tersebut, dijelaskan bahwa satu jiwa mewakili satu suara. Namun, dari keseluruhan penduduk Papua saat itu sebanyak 800.000 jiwa, hanya ada 1.025 suara yang masuk. Suara yang masuk itu memutuskan Papua bergabung menjadi bagian Indonesia dan disahkan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 2504 tanggal 19 Desember 1969 oleh 84 negara.

Lanjut Yapi, selain Pepera, akar konflik lainnya muncul terkait dengan identitas masyarakat Papua yang mayoritas termasuk ke dalam ras Melanesia. Berdasarkan peta sebaran ras Melanesia dari PBB tahun 2014, Pulau Papua banyak dihuni oleh ras Melanesia dengan ciri fisik berkulit hitam dan berambut keriting. “Mereka memang berbeda dari masyarakat Indonesia yang termasuk ras melayu,” tegas Yapi.

Oleh karenanya, masyarakat Papua berupaya untuk ikut dalam keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG). Namun, upaya ini menurut Yapi dianggap oleh kelompok lain sebagai ancaman bagi kedaulatan bangsa. “Pemerintah selalu menutupi usaha-usaha masyarakat Papua untuk masuk MSG dengan menggunakan slogan NKRI harga mati,“ ujar Yapi.

Sementara itu, Edo menyayangkan adanya stigma buruk yang terus dikembangkan dengan menggunakan identitas kemelanesiaan mereka. Stereotip tersebut, dalam pandangannya, lantas menjadi dasar beberapa oknum di masyarakat untuk membenarkan tindakan rasisme yang mereka lakukan selama ini. Ia merasa jika hal tersebut sengaja diciptakan di tengah masyarakat, bahkan seolah-olah dipelihara oleh pemerintah.

Padahal, Edo menambahkan, pemberantasan diskriminasi rasial adalah tugas dan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut diatur pada UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. “Siapa yang membangun stereotip itu? Siapa yang bertanggung jawab untuk menghilangkannya? Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberantas rasisme yang subur dalam keistimewaan Yogyakarta?” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Gaffar Karim S.IP., M.A., mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang mau menerima perbedaan. Dosen Mata Kuliah Politik Identitas UGM ini, justru melihat adanya kejanggalan dengan tindakan rasis yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta terhadap mahasiswa Papua. Ia juga menduga hal ini sengaja dibesar-besarkan untuk mengalihkan suatu isu terkait dengan perebutan lahan bisnis tertentu seperti tempat parkir. “Saya selalu curiga ada oknum dengan kepentingan ekonomi yang sedang bermain-main dan menggunakan masyarakat sebagai tameng,” tutup Gaffar. **[Henny, Maria, Tito]**

# Suara dari Timur: Menghapus Prasangka, Membangun Citra

*Di tengah interaksi dengan masyarakat, prasangka dan tuduhan buruk terhadap mahasiswa Papua terus terjadi. Alih-alih diam dan membiarkan, berbagai upaya positif terus digalakkan.*

Siang itu ruang *Programme on Humanitarian Actions* (PoHA) yang terletak di lantai dua gedung BA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM menjadi tujuan Tim Balairung. Berada di dalamnya beberapa orang tampak sedang bergulat dengan laptop masing-masing. Salah satunya adalah pria berkaos polo warna putih yang langsung menyambut dengan ramah. Ampy, begitu ia biasa dipanggil, memulai cerita dengan asal-usul dirinya.

Ia berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan telah berada di Yogyakarta sejak 2004 untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Filsafat UGM. "Dulu, tahun 2004 belum susah cari tempat tinggal seperti sekarang," ungkapnya. Selepas sarjana ia meninggalkan Yogyakarta dan baru kembali pada tahun 2012 untuk menempuh pendidikan magister. Menurutnya pada tahun 2012 suasana Yogyakarta sudah berbeda. Dalam proses mencari tempat tinggal, ia menjadi semakin kesulitan. Keadaan ini ia sadari karena identitasnya sebagai orang Indonesia Timur.

Sebagai Koordinator Advokasi di Institute of International Studies (IIS) dan PoHA, Ampy memiliki ketertarikan terhadap isu-isu diskriminasi. Salah satunya adalah diskriminasi terhadap mahasiswa-mahasiswi Indonesia Timur yang berada di Yogkayarta, termasuk Papua. Ketertarikan ini membantunya memahami proses terbentuknya stereotip dan stigma yang dilekatkan pada teman-teman Papua. Menurutnya perbedaan budaya dan tingkah laku yang tidak dapat diterima menjadi faktor pendukung adanya stereotip ini. "Gaya bicara kami memang keras, sehingga terkesan kasar padahal kami tidak seperti itu," tutur Bacim Yuli, rekan Ampy, mahasiswi asli Asmat, Papua.

Stereotip itu berlanjut tidak hanya dari gaya bicara, tetapi juga gaya hidup. Orang Papua dianggap pembuat onar, maka akses untuk mendapat tempat tinggal dipersulit. Pemilik *kos* menolak menyewakan tempat tinggalnya karena khawatir dengan perilaku tersebut. Meskipun hanya didengar dari orang lain, namun stereotip tersebut dapat menyebar dengan cepat. "Stereotip itu disalurkan dari satu mulut ke lainnya, dan dipercaya begitu saja," ungkap Ampy.

Untuk mengatasi itu beberapa orang melakukan inisiatif mengurangi stereotip tersebut. Tindakan ini dilakukan di lingkungan sekitar dengan berusaha memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. "Kami melakukan introspeksi dengan memperbaiki sikap kami di masyarakat agar ada perubahan pandangan," ujar Ampy.

Ampy menceritakan bahwa upaya mendekatkan diri dengan warga juga dilakukan melalui hal-hal sederhana secara kelompok maupun individu. Upaya paling nyata secara individu dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada dan berbaur. Sedangkan upaya yang dilakukan secara kelompok adalah mengikuti kegiatan bersama masyarakat. Menurut Sugito, warga sekitar Blunyahrejo, hubungan antara masyarakat dengan mahasiswa-mahasiswi Indonesia Timur terjalin dengan baik. Ia menuturkan bahwa mahasiswa-mahasiswi tersebut kerap mengikuti kegiatan di tengah masyarakat. Kegiatan yang diikuti pun beragam, seperti arisan, hingga kerja bakti membersihkan daerah sekitar. "Kami tidak pernah ada masalah dengan mereka, malah hubungan kami baik," tegasnya.

Bukan tanpa alasan, upaya ini diinisiasi karena sadar akan pentingnya menjaga hubungan dengan masyarakat. "Saya setuju kalau ada beberapa teman yang kacau, tetapi tentu tidak bisa digeneralisasi menjadi tingkah laku semua orang Papua," lanjut Ampy. Menurutnya, usaha menghapus stigma ini dilakukan setelah kesulitan mendapat tempat tinggal sering terjadi.

Sementara itu Ruben C. Frasa, Wakil Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA), menceritakan stereotip lain yang disematkan, yaitu masalah utang-piutang. Diakui oleh Ruben bahwa beberapa temannya berutang di beberapa rumah makan, dan berhutang terhadap pemilik tempat tinggal. Menurutnya, hal ini karena kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.

Salah satu usaha yang dilakukan Ruben sebagai wakil ketua adalah menyelesaikan

persoalan utang dengan para pemilik warung. Menurutnya kasus terbanyak terjadi di daerah Babarsari. "Jadi, permasalahan utang diselesaikan secara kekeluargaan," ungkapnya. Sering kali ia harus membantu membayarkan utang tersebut dengan uang pribadinya. Selain utang, Ruben membantu teman-temannya dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya ketika ada orang Papua ditemukan mabuk, maka warga sekitar akan menghubungi Ruben untuk mengurusnya.

Tidak berhenti di sana, upaya lain ditunjukkan dengan terlibat dalam perjuangan warga Jogja menyuarakan kelestarian sumber air. Pada tahun 2012, pembangunan Hotel Fave di Jalan Kusumanegara menuai protes oleh warga sekitar. Dodok, salah seorang warga Miliran, melakukan protes karena pembangunan Hotel Fave membuat sumur warga Miliran kering. Aksi protes yang berkali-kali dilakukan oleh Dodok mendapat dukungan dari mahasiswa Papua Asrama Kamasan. Dalam aksi kedua pada September 2012, mahasiswa Asrama Kamasan ikut bergabung dalam aksi. "Asrama Kamasan itu sudah ada sebelum saya, dan sudah jadi bagian dari warga sejak dulu," lanjutnya.

© Rusmul/BAL

Dodok menjabarkan lebih lanjut bahwa hubungan masyarakat dengan mahasiswa Papua tidak ada masalah berarti. Meskipun beberapa kali mahasiswa Papua terlibat pertengkaran, masyarakat sekitar asrama cukup menutup pintu. "Kalaupun mereka *ngamuk* kita sudah punya cara sendiri untuk mengatasi," lanjutnya. Memberi peringatan atau mengajak diskusi ketua asrama sudah menjadi solusi yang cukup ampuh menurut Dodok.

Sejalan dengan Ampy, Ruben memaparkan bahwa mahasiswa Papua di Asrama Bintuni juga sering berpartisipasi dalam kegiatan bersama warga. Seperti hari kemerdekaan Indonesia, bakti sosial, dan menjaga pos kamling secara bergiliran. Kegiatan olahraga juga menjadi cara mendekatkan diri dengan warga. Setiap Jumat, para mahasiswa di asrama mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan olahraga bersama warga. "Kami punya lapangan di belakang kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran, di sana kami berolahraga bersama dengan warga," ungkap Ruben.

Interaksi mahasiswa Papua dengan masyarakat sekitar diakui cukup dekat oleh Dadi, salah seorang warga sekitar asrama. Namun, kedekatan itu tidak membuat seluruh anggapan buruk masyarakat sekitar tentang mahasiswa Papua hilang. Baginya mahasiswa Papua memang kerap kali membuat kerusuhan di sekitar asrama saat mabuk. Hal ini membuat warga resah karena tidak pernah ada ruang diskusi terkait perilaku mahasiswa Papua tersebut. Walaupun ia akui yang kerap kali membuat onar justru orang Papua dari luar asrama. "Sikap mereka baik kalau tidak mabuk, kalau sedang mabuk warga jadi takut dan selalu menutup pintu," kisah Dadi.

Beberapa upaya juga dilakukan oleh pemerintah daerah Papua. Seperti diungkap Willem Wandik, Bupati Puncak, saat ditemui di tengah-tengah perjalanan dinasnya ke Yogyakarta. Dia membenarkan adanya laporan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di beberapa kota. Laporan terbanyak berasal dari Yogyakarta dan Surabaya. Untuk itu, ia menggiatkan berbagai sosialisasi di Yogyakarta bagi mahasiswa Papua. Seperti menaati peraturan dan tidak mengkonsumsi minuman keras. "Hal ini dilakukan untuk meredam prasangka dari masyarakat dan mengurangi perilaku buruk dari mahasiswa Papua," ujarnya.

Menurut Ampy upaya yang terus dilakukan terbukti membuahkan hasil. Usahanya bersama mahasiswa Papua lain untuk berbaur telah meninggalkan kesan baik terhadap warga. Selama empat tahun dia tinggal di Jetis, warga kini mulai terbuka menerima kehadiran mahasiswa dari Indonesia Timur. "Namun, kini tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan warga pada kami lebih besar," tuturnya. **[Bening, Cintya]**
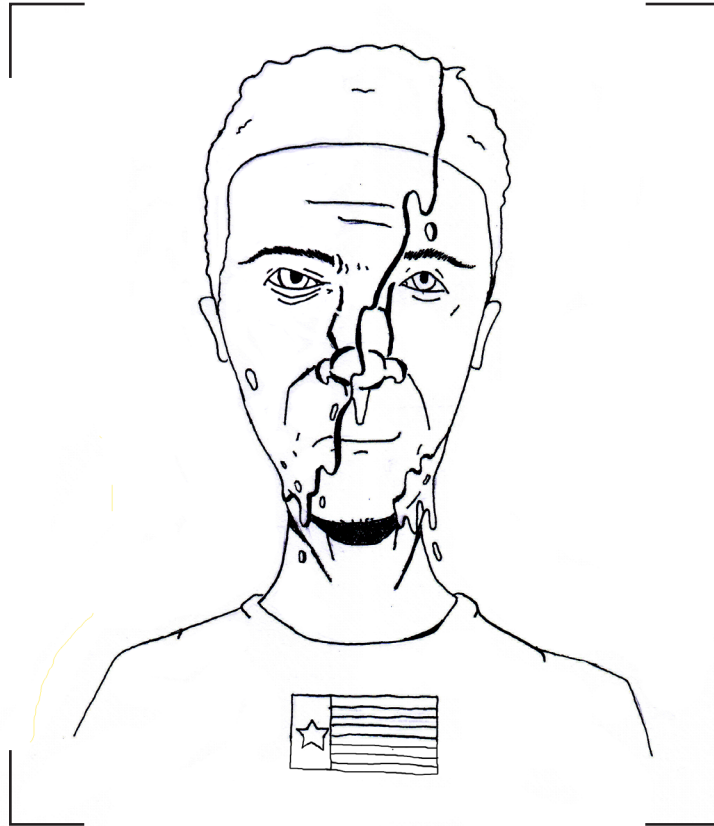
# Mengukur Perasaan Terancam Masyarakat di Yogyakarta terhadap Mahasiswa Papua

*Diskriminasi terhadap mahasiswa Papua kemungkinan disebabkan karena masyarakat merasa terancam. Interaksi lebih di antara keduanya diharapkan dapat mengurangi perasaan tersebut.*



Mahasiswa Papua di Yogyakarta kerap menjadi korban diskriminasi. Selain sulit mendapatkan indekos, mereka juga menerima kekerasan seperti saat pengepungan asrama mahasiswa Papua di Kamasan pada Juli 2016 lalu. Memang ada beberapa mahasiswa Papua yang meresahkan masyarakat dengan mabuk-mabukan dan membuat keributan. Namun sayangnya, tingkah laku sebagian orang tersebut dipukul rata terhadap semua mahasiswa Papua dan berkembang menjadi stereotip di masyarakat. Stereotip inilah yang terkadang dijadikan pembenaran bagi beberapa orang untuk melakukan diskriminasi.

Dalam *intergroup threat theory* (ITT) yang dikembangkan oleh Stephan (2009), stereotip hanyalah salah satu faktor penyebab tindak diskriminasi. Menurut Stephan, ada faktor yang lebih dominan, yakni perasaan terancam—perasaan terancam satu kelompok karena kehadiran kelompok lain. Gonzalez (2008) menegaskan teori ini dalam studinya mengenai prasangka masyarakat Belanda terhadap imigran. Tidak hanya itu, Gonzalez menemukan bahwa kontak antara kelompok satu dengan lainnya dapat mengurangi perasan terancam yang dimiliki. Bahkan, berpapasan saja sudah cukup untuk menambah tingkat penerimaan terhadap imigran.

Berdasarkan teori tersebut, masyarakat yang sering berinteraksi dengan mahasiswa Papua seharusnya tidak merasa terancam. Sebab, dengan berinteraksi, masyarakat dapat membenahi stereotip yang terbentuk terhadap mahasiswa Papua. Dengan demikian, tindakan diskriminasi pun bisa dikurangi. Namun, apakah masyarakat di Yogyakarta merasa terancam dengan kehadiran mahasiswa Papua?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, Divisi Riset BPPM Balairung UGM mengadakan jajak pendapat dengan kuesioner pada tanggal 1–4 Juni 2017. Dalam proses pengambilan data, responden diberi tahu mengenai ciri-ciri identitas

ras Papua. Menurut Alfred Kroeber (1948), sebagai bagian dari ras Melanesia, orang Papua memiliki ciri-ciri kulit kehitam-kehitaman serta rambut hitam yang tebal dan keriting. Pemberitahuan ciri-ciri tersebut bertujuan agar responden mengerti mahasiswa Papua yang dimaksud dalam kuesioner.

Responden adalah masyarakat yang berada di sekitar empat universitas dengan proporsi mahasiswa Papua yang relatif banyak di Yogyakarta, yaitu Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Akademi Pembangunan Masyarakat Desa. Kuesioner diberikan kepada responden yang kebetulan berada di lokasi tersebut (*convenience sampling*). Responden berjumlah 102 orang dan 64,7% berasal dari Yogyakarta sedangkan 35,7% sisanya bukan dari Yogyakarta.

Lokasi penyebaran kuesioner di atas dipilih untuk memastikan intensitas kontak yang tinggi antara responden dan mahasiswa Papua. 88,2% responden mengiyakan adanya mahasiswa Papua di lingkungan mereka. Hal tersebut memberi peluang untuk terjadinya papasan atau interaksi. Berpapasan berarti sebatas bertemu di jalan, sedangkan berinteraksi maksudnya saling sapa atau melakukan percakapan. 73,5% responden sering berpapasan dan 37,3% sering berinteraksi dengan mahasiswa Papua. Data tersebut menunjukkan intensitas kontak yang tinggi. Selain itu, 67,6% responden merasa biasa saja ketika melakukan kontak dengan mahasiswa Papua. Hal itu dapat dijadikan sebagai indikasi awal bahwa responden tidak merasa terancam.

Untuk mengonfirmasi indikasi itu, perasaan terancam responden diukur dengan ITT. Dalam ITT dikenal dua jenis ancaman, yaitu simbolis dan realistis. Ancaman simbolis berarti ancaman terhadap budaya yang dimiliki suatu kelompok. Sementara itu, ancaman realistis berarti ancaman terhadap kesejahteraan suatu kelompok, seperti keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kualitas layanan publik dan pendidikan.

Paling banyak hanya 26,5% responden yang merasa mahasiswa Papua mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Yogyakarta. Sementara itu, mayoritas responden, sebesar 38,2%, memilih netral. Namun, 35,3% responden membantah hal tersebut. Apabila persentase netral dikecualikan, dapat dikatakan bahwa responden cenderung tidak merasa terganggu sebab persentase yang membantah lebih dari yang menyetujui. Responden juga tidak merasa terganggu dari segi layanan publik. 78,4% responden merasa kualitas layanan publik tetap sama walaupun ada mahasiswa Papua. Terlebih lagi, 77,4% menyetujui penyamaan kualitas layanan publik antara mahasiswa Papua dengan masyarakat di Yogyakarta. Penyamarataan
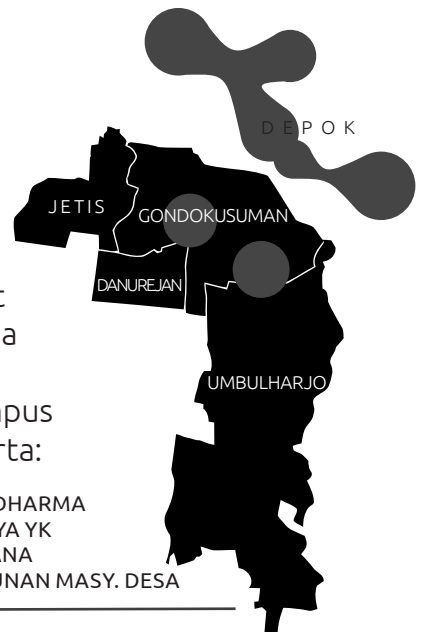
88,2% responden mengiyakan adanya mahasiswa Papua di sekitar mereka

73,5% responden sering **berpapasan** dengan mereka

| SERING | KADANG | JARANG | TIDAK PERNAH |
|---|---|---|---|
| 73,5% | 17,6% | 7,8% | 1% |

pun, hanya ...

| SERING | KADANG | JARANG | TIDAK PERNAH |
|---|---|---|---|
| 37,5% | 19,6% | 24.5% | 18.5% |

37,5% responden yang sering **berinteraksi** dengan mereka
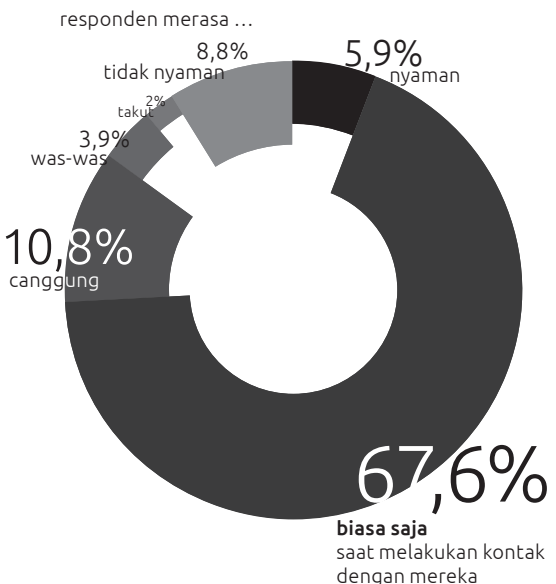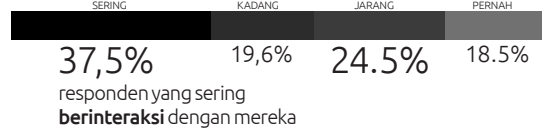
ini tidak hanya terbatas pada layanan publik saja, melainkan menyebar hingga ke ranah pendidikan. Sedikitnya 94,1% responden menyetujui kesetaraan pendidikan bagi mahasiswa Papua. Dari paparan di atas, bisa dikatakan bahwa responden tidak terancam secara realistis.

Namun, secara simbolis responden merasa terancam. Sebesar 90,2% responden mengharuskan mahasiswa Papua untuk menyesuaikan diri dengan budaya di Yogyakarta. Terlebih lagi, 59,8% beranggapan bahwa mahasiswa Papua harus menerima budaya di sini. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa responden merasa budaya di Yogyakarta terancam oleh kehadiran mahasiswa Papua. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pandangan masyarakat di Yogyakarta yang mengikuti peribahasa *di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*. Artinya, pendatang harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Peribahasa tersebut kerap diujarkan oleh responden dalam proses penyebaran kuesioner. Hal tersebut bertolak belakang dengan pandangan multikulturalisme yang menurut Liliweri (2005) berarti saling menghargai melalui pertukaran kebudayaan dan keyakinan. Ini berarti mendukung keragaman budaya dan tidak menuntut pendatang untuk beradaptasi dengan budaya yang ada.

Meskipun demikian, ancaman yang dirasakan responden tidak sampai melemahkan budaya di Yogyakarta. Setidaknya 62,9% responden menyetujui hal tersebut. Terlebih lagi, 67,6% merasa bahwa mahasiswa Papua memiliki nilai-nilai moral yang sama dengan masyarakat di Yogyakarta. Sekilas, ini menunjukkan bahwa responden tidak terancam secara simbolis. Namun, saat persentase ancaman simbolis diubah menjadi skor, mayoritas responden, sebesar 45,1%, menghasilkan skor di atas titik netral. Hal ini membuktikan bahwa responden merasa terancam secara simbolis.

Lalu apa kaitannya dengan intensitas kontak antarkelompok? Untuk menjawab pertanyaan ini, skor ancaman realistis dan simbolis dijumlahkan untuk mengetahui perasaan terancam responden secara keseluruhan. Berdasarkan tes binomial, median skor ancaman responden (21) secara signifikan berada di bawah skor netral (24). Ini mengindikasikan bahwa responden secara keseluruhan tidak merasa terancam dengan kehadiran mahasiswa Papua—meskipun secara simbolis iya. Sementara itu, saat skor ancaman ini dikorelasikan dengan intensitas kontak, hasil uji Spearman menunjukkan nilai negatif. Itu berarti rendahnya tingkat perasaan terancam responden berkaitan dengan tingginya intensitas kontak antar-kelompok.

Melihat hal tersebut, peningkatan interaksi sepertinya dapat menekan tindak diskriminasi terhadap mahasiswa Papua. Sebab, dengan melakukan interaksi, masyarakat dapat membenahi stereotip yang terbentuk sehingga dapat mengurangi perasaan terancam. Interaksi antara keduanya juga dapat mewujudkan rasa saling menerima dan memahami satu sama lainnya. **[Alnick, Jihad, Parasurama]**

responden berpendapat bahwa ...

| Pernyataan | Persentase |
|---|---|
| mereka tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan | 38,2% |
| mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sama | 67,6% |
| kualitas layanan publik antara mereka dan masyarakat Yogyakarta tidak perlu dibedakan | 67,6% |
| kualitas layanan publik di Yogyakarta tetap sama walaupun ada mahasiswa Papua | 72,5% |
| mereka tidak harus menyesuaikan diri dengan budaya Yogyakarta | 57,8% |
| mereka tidak harus menerima budaya Yogyakarta | 49% |
| mereka tidak melemahkan budaya Yogyakarta | 56,9% |
| mereka memiliki nilai-nilai moral yang sama seperti masyarakat di Yogyakarta | 63,7% |
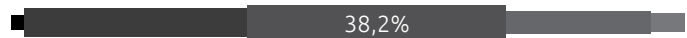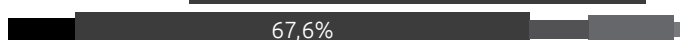
SANGAT SETUJU · SETUJU · NETRAL · TIDAK SETUJU · SANGAT TIDAK SETUJU
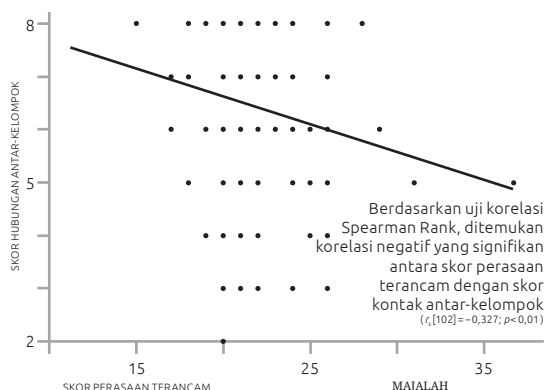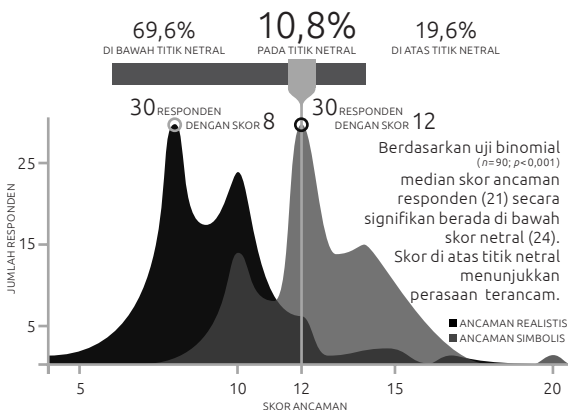
*dekat di mana pun,*
***kapan pun.***

*balairungpress.com*

© Hamzah/BAL
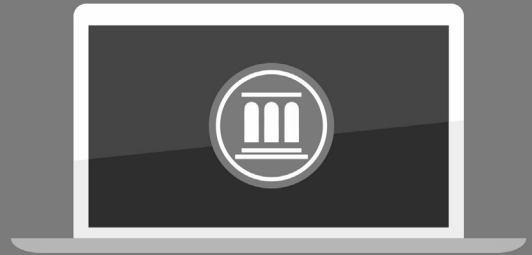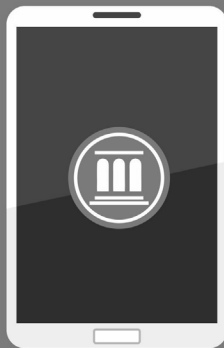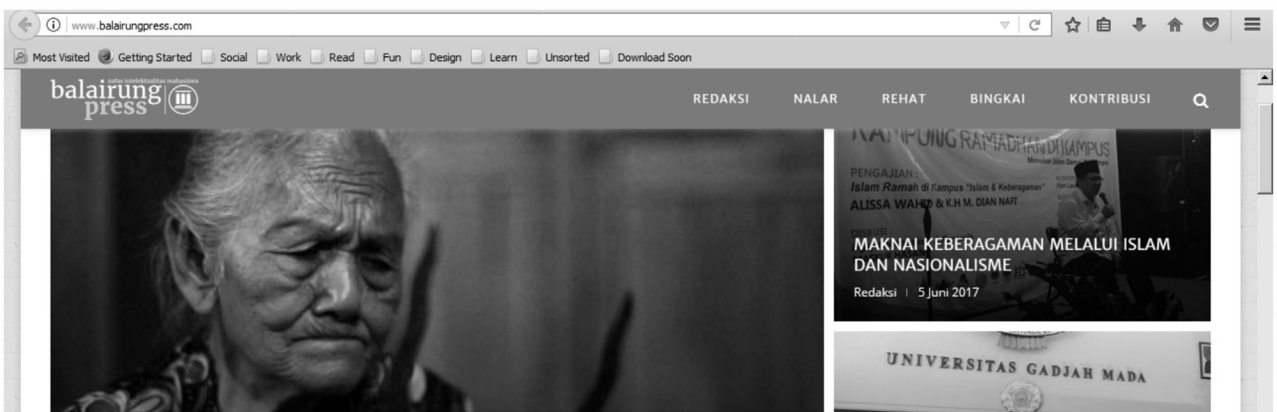
Febriana Firdaus

# Melawan Tuna Sejarah Sejak dari Kampus



Tahun lalu, saya mengunggah sebuah video yang menunjukkan bagaimana perlakuan aparat terhadap mahasiswa Papua yang melakukan aksi protes pada pemerintah Indonesia terkait berbagai masalah di tempat mereka. Video itu langsung viral, dan membuat orang yang melihatnya marah.

Padahal, perlakuan aparat terhadap kaum Melanesia yang menghuni pulau paling timur di Indonesia ini sudah sering saya baca dan dengar. Saya juga sudah dua kali meliput di Papua, pertama saat dikirim *TEMPO* pada 2012 dan kedua saat dikirim oleh *TIME* tahun ini. Semua bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan aparat ini, ibaratnya, sudah menjadi penderitaan sehari-hari masyarakat di Papua.

Terkait pemberitaan itu, saya melihat ada tiga reaksi masyarakat. Pertama adalah mengamini, kedua iba, dan ketiga tak peduli. Baru sedikit orang yang merasa perlakuan aparat pada mahasiswa Papua tersebut adalah bentuk represi dan melanggar kepatutan dalam memperlakukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat kemanusiaan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Sebab, aparat kerap menyebut mereka dengan 'monyet'.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan kita? Mengapa kita tidak tergugah saat melihat video penyiksaan itu?

Bisa jadi ini adalah hasil dari indoktrinasi wacana besar dari rezim sebelumnya soal Papua. Bahwa Papua bergabung dengan Indonesia dengan sukarela, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk ekspresi dari orang Papua yang memperjuangkan hak bersuara dan hak mengemukakan pendapat dapat dikategorikan sebagai separatis.

Padahal, tidak demikian adanya. Saya harus mengakui, waktu saya mahasiswa di Universitas Airlangga, saya belum memahami betapa berbahayanya memakai kata 'separatisme' itu. Kini, saya memahami bahwa kata itu bermuatan persekusi yang sangat halus, atau sabotase. Dalam perjalanan saya menjadi wartawan, barulah saya memahami kata-kata itu. Dan barulah saya menyadari bahwa ketidakpahaman atas kata-kata itu karena saya tuna sejarah.

Mungkin itu juga yang terjadi dengan masyarakat kita, termasuk saya (dulu) dan mahasiswa pada umumnya.

Menurut saya, penting untuk masyarakat dan mahasiswa tidak terus-menerus menjadi tuna sejarah dan tak mau peduli saat mahasiswa Papua berorasi. Dan itu harus dimulai dari kampus.

Saya masih ingat saat masih di bangku kuliah, seorang dosen mengatakan ada dua pendekatan yang dilakukan Indonesia pada Papua. Pertama, pendekatan keamanan dan kedua, pendekatan kesejahteraan. Dosen tersebut seakan sedang meminta mahasiswanya untuk mencari solusi agar Indonesia bisa mendamaikan Papua, ibarat anak tiri yang baru diadopsi, perlu kita belikan seperangkat alat tulis dan mainan.

Saya merasa penjelasan dosen yang normatif tentang Papua tidak bakal membantu banyak. Jajaran staf di kampus seharusnya berbeda dengan guru di sekolah yang memang hanya mengajarkan apa yang tertulis di buku sejarah versi pemerintah.

Saya kira diskusi kritis perlu dibuka, terutama terkait dengan sejarah. Sayangnya, diskusi mengenai hal itu justru didapatkan di warung-warung kopi atau lesehan, misalnya ketika mereka membahas penembakan beberapa mahasiswa usai demo di

Bundaran Hotel Indonesia. Aksi damai mahasiswa Papua itu rutin diadakan setiap tanggal 1 Desember untuk merayakan hari kebebasan berkespresi di tanah itu.

Lalu bagaimana memulai diskusi tentang Papua?

Diskusi itu bisa dimulai dari mengapa setiap tanggal 1 Desember, asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta selalu dijaga ketat? Bahkan sampai mahasiswa yang di asrama tak dapat membeli makanan.

Tentu saja ini bukti ketakutan pemerintah Indonesia bahwa Papua akan menyuarakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tanahnya. Mulai dari penangkapan sampai pembunuhan aktivis.

Mahasiswa perlu tahu bahwa penembakan warga sipil di Papua bukan isapan jempol. Saya pernah menulis berita dari laporan Komisi Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Brisbane, Australia berjudul *We Will Lose Everything* pada 2016 mengangkat persoalan-persoalan kekerasan dan marjinalisasi di Papua sejak tahun 1960-an.

Semua kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua ini, menurut laporan tersebut, bermula dari keterlibatan kekuatan-kekuatan internasional yang memungkinkan pemerintah Indonesia menguasai Papua pada tahun 1960-an tanpa persetujuan yang bebas dari orang-orang Papua.

Saya kira diskusi kritis perlu dibuka, terutama terkait dengan sejarah. Sayangnya, diskusi mengenai hal itu justru didapatkan di warung-warung kopi atau lesehan, misalnya ketika mereka membahas penembakan beberapa mahasiswa usai demo di Bundaran Hotel Indonesia

Peristiwa politik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai referendum diadakan pada 1969 di Papua Barat untuk menentukan status hak milik daerah tersebut, antara milik Belanda atau Indonesia. Referendum ditolak oleh sejumlah warga Papua, sehingga Pepera dipercaya berakibat pada terjadinya berbagai tindak kekerasan yang sistematis hingga hari ini.

Laporan serupa juga pernah disebut oleh International Coalition for Papua (ICP) pada 2015 terkait kondisi hak asasi manusia di sana. Dalam ringkasan eksekutifnya, ICP mengungkap bahwa pelanggaran HAM di Papua terus terjadi. Masyarakat adat di Papua sering menjadi korban, karena terdesak oleh semakin banyak transmigran yang datang. Lalu, penangkapan terhadap pendemo terus meningkat dari tahun sebelumnya. Angka intimidasi terhadap jurnalis lokal juga bertambah bahkan hampir dua kali lipat, setidaknya 22 orang meninggal karena kekerasan oleh aparat. Laporan itu juga menyebut tentang tewasnya empat anak sekolah di Paniai karena ditembak aparat.

Jangan terkejut membaca laporan ini, karena nyawa di Papua memang gampang melayang kalau perkara mengemukakan pendapat atau berekspresi. Seperti yang terjadi di Paniai, kebetulan saya baru mengunjungi tempat ini pada pertengahan Maret lalu, nyawa empat anak melayang karena mereka ikut protes bersama warga setelah terjadi pemukulan dan penembakan terhadap sekelompok anak lainnya di sebuah pondok natal di wilayah itu. Karena kondisi-kondisi inilah, mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia kerap melakukan protes. Termasuk di Yogyakarta.

Kadang mereka sendiri tak peduli dengan nyawa mereka saat berdemonstrasi. Pada 2 Desember 2015, saya mewawancarai Nicko A. Suhuniap yang terbaring lemas di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ia adalah peserta demo kebebasan berekspresi yang digelar oleh masyarakat Papua se-Jawa-Bali di Bundaran Hotel Indonesia pada 1 Desember 2015. Akibat demo itu, ia cedera di bagian dada, bahu belakang, dan kepala sebelah kanan karena tembakan. Nicko menuturkan pada saya awalnya ia terkena gas air mata. "Saya langsung terjatuh, lalu polisi datang, injak-injak saya, dada, leher, semua," katanya. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, aparat tak pernah mengakui bahwa tembakan itu dari pihaknya. Padahal, tidak ada pihak kedua atau ketiga yang memegang senjata di lapangan selain aparat.

Impunitas dan pembungkaman ini terjadi bertahun-tahun, bahkan kadang saya melihat media juga bagian dari hal ini. Tak heran, pembaca kita suka merasa asing dengan berita-berita tentang Papua.

Karena itu, ketika para intelektual, penegak hukum, dan media tak bisa diharapkan, mahasiswa seharusnya memegang peranan penting dalam pelurusan sejarah dan isu tentang Papua. Dimulai dari kampus, kita bisa memerangi gejala tuna sejarah, memulai dan membuka diskusi dengan melibatkan mahasiswa Papua. Bukan malah memfasilitasi pemerintah dengan menjadi penengah antara mahasiswa dan polisi.

Mahasiswa Indonesia lain seharusnya punya sikap dan berpihak pada kelompok yang terdiskriminasi. Apalagi kalau lembaga itu bernama Badan Eksekutif Mahasiswa, bukannya itu fungsi mahasiswa? Agen perubahan, bukan agen pemerintah.

Tapi upaya perlawanan pada fenomena tuna sejarah ini tentunya perlu proses, karena toh organisasi di kampus itu banyak disusupi oleh kepentingan politik dari partai-partai yang memang dekat dengan militer. Cukup sulit membuka pikiran dari kelompok ini, jika segala daya upaya untuk menjelaskan mereka tentang pelanggaran HAM di Papua tak mempan dan aparat masih represif. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh separatis dan mengganggu keamanan, dan militer juga sudah mulai masuk kampus menggunakan organisasi mahasiswa. Maka hanya ada satu kata, saran Widji Thukul: lawan (kaum tuna sejarah dengan narasi yang tandingan berdasar fakta)!

**Febriana Firdaus** *adalah reporter yang telah menekuni profesi jurnalis sejak 2007. Berkat keberaniannya dalam menuliskan berita dan keberpihakannya pada orang yang dilanggar haknya, di awal tahun 2017 Febriana meraih Penghargaan Oktovianus Pogau dari Yayasan Pantau.*

# Melampaui Toleransi

*Mustaghfiroh Rahayu*

©Deny/BAL

Intoleransi di Yogyakarta akhir-akhir ini mendapat sorotan. The Wahid Institute menobatkan Yogyakarta sebagai daerah paling intoleran kedua setelah Jawa Barat dalam laporan tahunan 2014. Peringkat ini agak membaik dengan menduduki rangking ke-4 di tahun 2015. Namun demikian, catatan intoleransi tidak lantas hilang dari laporan-laporan mengenai Yogyakarta. Publikasi terbaru Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Pascasarjana UGM menyebutkan paling tidak ada 13 kasus intoleransi terjadi di Yogyakarta pada tahun 2016, mulai dari upaya penutupan pesantren waria, pembubaran diskusi, dan pemutaran film di berbagai tempat, hingga kasus pengepungan Asrama Papua pada saat rencana kegiatan pentas budaya dalam rangka memperingati budayawan Papua (Ahnaf dan Salim, 2017).

Tulisan pendek ini akan berusaha mengupas intoleransi yang terjadi terhadap kelompok pendatang, terutama yang berasal dari Papua dari perspektif multikulturalisme dan apa yang bisa diupayakan.

**Apakah Indonesia negara multikultural?**

Di penghujung tahun 2009, Indonesia kehilangan Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemakaman beliau mengatakan bahwa Indonesia sangat kehilangan bapak pluralisme dan multikulturalisme.

Pluralisme dan multikulturalisme dalam khazanah pengetahuan masyarakat Indonesia adalah dua hal yang sama-sama digunakan untuk merujuk pada keragaman. Keduanya digunakan bergantian tanpa ada konsekuensi teoretis yang merisaukan. Sementara jika merujuk pada sejarah dua istilah ini, akan tampak jejak yang sangat berbeda dan tidak mudah disatukan.

Tulisan klasik terkait masyarakat plural yang hingga sekarang masih menjadi rujukan adalah karya J.S. Furnivall tentang masyarakat Indonesia. Furnivall, ekonom berkebangsaan Inggris, pada masa kolonial melakukan pengamatan mengenai masyarakat yang cukup beragam latar belakang agama, etnis, maupun sukunya di Indonesia. Berangkat dari masyarakat yang homogen di Eropa, keragaman Indonesia ini sangat menarik baginya. Dalam karya tersebut, Furnivall mendefinisikan masyarakat plural dengan "*comprising two or more elements or social order, which live side by side, yet without mingling, in one political unit*" (Furnivall, 1939). Menurut Furnivall, Indonesia kala itu terdiri dari tiga lapisan masyarakat yang masing-masing merepresentasikan etnis tertentu dan pembagiannya sesuai dengan pembagian kerja. Lapisan pertama adalah para kolonial berkulit putih yang menguasai pemerintahan, kedua adalah orang-orang Cina yang menguasai perdagangan, dan yang ketiga adalah kelompok pribumi yang sebagian besar bekerja di pertanian.

Sementara itu, istilah multikulturalisme baru muncul belakangan dari akademisi Barat setelah melihat Eropa dan Amerika yang berubah di tahun 1960-an. Di Amerika, multikulturalisme adalah istilah politis yang digunakan untuk mengakui hak asasi dan kedudukan setara setiap warga negaranya karena meningkatnya klaim kelompok-kelompok yang berbeda. Ini adalah bagian dari politik identitas untuk mendapatkan pengakuan.

Sementara di Eropa, multikulturalisme adalah respons atas hadirnya imigran dari luar Eropa, terutama kelompok non-kulit putih ke negara mayoritas kulit putih. Dalam hal ini, multikulturalisme dimaknai lebih sempit lagi, hanya pada konsekuensi dari migrasi dan perjuangan dari beberapa kelompok marginal (Modood, 2013).

Dua model multikulturalisme ini sangat berbeda dengan Indonesia. Indonesia, dan juga sebagian besar negara-negara Asia, sejak semula adalah beragam. Sejak belum diproklamasikan sebagai sebuah bangsa, masyarakat Indonesia sudah bersuku-suku, tempat hidup berbagai agama, dan memiliki latar belakang etnis yang beragam.

John R. Bowen dalam *Multiculturalism in Asia* (2005) menyebutkan tiga hal yang menjadi dasar

keragaman (*normative pluralism*) di Indonesia, yaitu agama (*religion*), kedaerahan (*regionalities*) dan etnis (*ethnicities*). Keragaman dari ketiga unsur itulah yang menjadikan Indonesia disebut sebagai negara yang plural.

Namun, akhir-akhir ini keragaman Indonesia yang dibangga-banggakan itu sedang diuji. Relasi antara penduduk asli dan pendatang di beberapa kota di Indonesia memanas, salah satunya di Yogyakarta. Para mahasiswa Papua yang belajar di Yogyakarta merasa tidak nyaman karena stigma, *prejudice*, dan tindakan diskriminatif yang menimpanya. Puncaknya adalah kekerasan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Kamasan tahun 2016 lalu.

**Mahasiswa Papua di Yogyakarta**

Dalam satu wawancara, Ust. Jazir, budayawan Yogyakarta, mengatakan salah satu sumber dari persoalan intoleransi di Yogyakarta adalah ketika orang-orang yang tinggal di Yogyakarta sudah tidak mengikuti tata cara hidup Jogja, terutama pendatang. Para pendatang yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa ini masih hidup dengan cara masing-masing. Mereka yang dari Sumatra dengan gaya Sumatranya, yang dari Kalimantan dengan gaya Kalimantan, yang dari Papua juga dengan gaya Papuanya. Hal ini diperparah karena sebagian dari pelajar dan mahasiswa pendatang ini tinggal di asrama-asrama daerah. Jumlah asrama daerah di Yogyakarta, menurut Jazir, mencapai ratusan. Papua sendiri memiliki 23 asrama mahasiswa. Ini yang menjadikan mereka tidak bisa membaur dengan masyarakat umum dan membuahkan kecurigaan dan berujung pada konflik.

Akan tetapi, pada praktiknya, membaur bagi mahasiswa Papua ini juga bukan perkara mudah. Stereotip dan stigma yang melekat kepada mereka menjadikan mereka susah mencari tempat tinggal. Biasanya, dalih yang paling mudah untuk menolak mereka adalah dengan menempelkan tulisan “Hanya Menerima Kos Muslim” atau “Tidak Menerima Kos NON Muslim”.

Tulisan seperti ini mengandaikan siapapun asal muslim bisa diterima tinggal di *kos* ini. Akan tetapi, yang demikian tidak terjadi bagi mahasiswa Papua. Parto, salah satu mahasiswa Papua muslim menceritakan bahwa, meskipun muslim, dia tetap mendapat kesulitan untuk mendapat *kos-kosan*. Dengan demikian, diskriminasi yang dialamatkan ke mahasiswa Papua ini bukan hanya karena agama mereka, akan tetapi faktor yang lebih kuat yaitu latar belakang etnis.

**Melampaui Toleransi**

Keragaman adalah sesuatu yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala (permanen). Ini artinya berbeda adalah niscaya. Satu-satunya alternatif kekuatan untuk menjadikan masing-masing pihak bisa hidup berdampingan dengan harmonis adalah toleransi. Namun, dalam konteks mahasiswa Papua di Yogyakarta, saya berpendapat, toleransi saja tidak cukup.

Toleransi secara sederhana berarti hak untuk berbeda (*right to differ*). Hak untuk berbeda atas dasar apa saja (Hasyim, 2017). Ia bisa berbentuk hak untuk berbeda agama, suku, budaya, hobi, makanan favorit dan lain sebagainya. Menurut definisi ini, pihak yang menolak hak untuk berbeda atau ruang kebebasan dianggap sebagai pihak yang intoleran. Namun, pertanyaannya, apakah toleransi ada batasnya? Apakah kita tetap harus memberikan hak untuk berbeda jika para pendatang itu melanggar tata krama masyarakat yang ditempati? Apakah hak untuk berbeda itu juga mencakup menjalankan hidup sebagaimana di tempat asal? Apakah menuntut mahasiswa Papua untuk berperilaku ala Jogja adalah sikap intoleran?

Di antara hal-hal yang menjadi masalah ketika bersinggungan dengan mahasiswa Papua adalah label bahwa mereka temperamental, suka mabuk-mabukan, suka melanggar aturan, dan suka berkelahi yang notabene adalah bagian dari kebiasaan/tradisi dari tempat asal. Ada juga pemilik *kos* yang tidak mau menerima anak *kos* dari Papua karena alasan beberapa kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat Papua, misalnya kumpul-kumpul (pesta) dan mengunyah sirih. Stigma ini sebagiannya diakui benar oleh Aris Yeimo, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa digeneralisasi.

Jika hubungannya dengan tradisi, menurut saya, toleransi saja tidak cukup. Toleransi hanya menuntut kita untuk tahu bahwa mereka memiliki tradisi yang berbeda, akan tetapi masih terbuka untuk memberi label ataupun stigma negatif. Yang kita butuhkan saat ini adalah keterlibatan dengan perbedaan (*engagement with diveristy*) melalui dialog antarbudaya.

Dialog mengandaikan masing-masing pihak sadar bahwa tradisi adalah bagian penting dari identitas seseorang yang wajib dihormati. Melarang mahasiswa Papua untuk kumpul-kumpul atau mengunyah sirih adalah tindakan intoleran, namun di sisi lain, memaksa pemilik *kos* menoleransi pesta-pesta yang diadakan di *kos-kosan* juga perilaku intoleran. Mungkin benar bahwa salah satu masalah adalah tidak adanya pembauran mahasiswa pendatang dengan masyarakat lokal karena adanya asrama-asrama daerah, akan tetapi berlebihan juga jika alternatifnya menuntut mahasiswa Papua ini menjadi Jawa. Perjumpaan dan dialog antarkelompok ini penting untuk dilakukan agar kita tidak terjebak pada moral monisme (keyakinan bahwa suatu cara hidup—tradisi—lebih superior daripada yang lain).

---

**Mustaghfiroh Rahayu** *merupakan dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Minat penelitiannya meliputi gender dan agama, seksualitas, dan hubungannya dengan kebijakan publik, serta isu-isu perempuan dalam masyarakat multikultur.*

# Jelajah Ragam Olahan Jamur ala Jejamuran

© Mirna/BAL

*Berlokasi di pinggiran kota, Jejamuran menunjukkan eksistensinya dengan menyajikan beragam olahan jamur. Tak hanya olahan, Jejamuran juga memikat pengunjung dengan dekorasi serta edukasi kecil tentang jamur.*



Suasana ramai tampak di sebuah bangunan dengan dekorasi jamur. Kerumunan orang terlihat mengantre untuk berfoto di depan sebuah pohon imitasi dari susunan jamur lingzhi. Beberapa meter dari pohon itu terlihat jamur jenis lain yang ditanam pada media tumbuh dan diletakkan dalam kotak-kotak kayu.

Kotak-kotak kayu disusun berdasarkan jenis jamur. Kelompok jamur bertudung bulat dengan warna putih dan abu-abu adalah jamur portabella. Di sebelahnya, terlihat jamur kancing yang tudungnya berukuran lebih kecil. Di belakang kelompok jamur ini ada kelompok jamur shiitake yang berwarna cokelat dengan tudung berkerak. Kemudian, di depannya terdapat kelompok jamur yang memiliki tudung lebar berwarna abu-abu dan putih. Tampak pula satu kelompok jamur dengan bentuk serupa namun bertudung merah. Ketiganya merupakan jenis jamur tiram. Selain itu, kelompok jamur lain, seperti merang, kuping, king oyster, serta lingzhi juga tumbuh pada susunan kotak kayu lain.

Sekilas, tempat ini terlihat seperti galeri jamur. Namun, ini adalah bagian restoran Jejamuran yang berlokasi di Jalan Pramuka, Niron, Pandowoharjo, Sleman. Sesuai namanya, jamur menjadi daya tarik restoran ini. Mulai dari dekorasi restoran sampai makanan yang dijual, semuanya mengandung unsur jamur.

Ide mendirikan restoran khusus olahan jamur ini muncul dari pengetahuan tentang jamur yang dipelajari Ratidjo Hardjosuwarno sejak 1968. Berbekal pengetahuannya tersebut, Ratidjo memutuskan untuk membudidayakan jamur. Tak disangka, hasil panennya lebih dari yang diperkirakan. “Akhirnya, Pak Ratidjo mencoba membuat masakan berbahan baku jamur dan setelah itu dikomersialkan,” ungkap Lilik Sulastri, Supervisor Restoran Jejamuran.

Alasan lain yang melatarbelakangi berdirinya Jejamuran adalah keinginan Ratidjo untuk mengubah persepsi masyarakat tentang jamur. “Selama ini jamur dianggap menjijikkan, padahal sebenarnya jamur adalah bahan makanan yang sehat,” ungkap Lilik. Jamur merupakan makanan sehat karena rendah kolesterol dan kaya serat.

Ragam makanan yang ditawarkan Jejamuran berkembang seiring berjalannya waktu. Dulunya, Jejamuran hanya menjual empat menu makanan. Makanan tersebut dijual di sebuah tenda yang terletak di pinggir jalan. Setelah tempat berjualan berkembang menjadi bangunan permanen pada 2009, Jejamuran mengembangkan masakannya menjadi 25 ragam menu masakan.

Ragam menu itu, antara lain sate, tongseng, tom yum, pepes, rendang, semur,  jamur asam manis, dan jamur goreng tepung. Setiap menu menggunakan jenis jamur yang berbeda-beda. Tongseng berisi jamur merang, sedangkan tom yum berisi jamur kuping dan shiitake. Untuk menu jamur asam manis dan jamur

goreng tepung, Jejamuran menawarkan tiga pilihan jenis jamur, yakni jamur tiram, shiitake dan portabella.

Salah satu olahan jamur yang memiliki penggemar cukup banyak adalah sate jamur. Seporsinya terdiri dari lima tusuk sate jamur tiram dengan tambahan potongan tomat dan kubis. Tampilan sate jamur memang menyerupai sate daging, demikian pula rasanya. "Jika tidak tahu ini jamur, mungkin akan dikira daging," ujar Endah, seorang pengunjung Jejamuran. Daging jamur tiram yang disiram saus kacang dengan campuran kecap manis menghasilkan perpaduan yang lezat.

Andalan lain Jejamuran adalah Summer Breeze. Minuman ini memiliki tampilan menarik dengan warna oranye dan biru yang saling bersinggungan. Warna tersebut dihasilkan dari perasan jeruk valencia dan sirup. Hal lain yang menjadikan Summer Breeze menarik adalah tambahan beberapa tangkai jamur enoki serta potongan jeruk valencia di dalamnya. Rasa asam jeruk, manis sirup, serta tekstur kenyal jamur enoki berpadu menghasilkan sensasi kesegaran ketika diteguk.

Jejamuran juga menyediakan minuman berbahan baku jamur lain, yaitu Wedang Jejamuran. Minuman ini diramu dari jamur lingzhi yang berasal dari Cina. Dengan karakteristik tudung lebar, keras, dan berwarna cokelat, jamur ini memiliki khasiat mengobati penyakit kanker, tumor, hipertensi, serta kolesterol tinggi. "Jamur lingzhi semakin bagus untuk dikonsumsi jika warna tudungnya semakin gelap," terang Rahmat Arif Nugroho, petugas bagian pertanian di Jejamuran. Bagi pengunjung yang ingin menikmatinya di rumah, Jejamuran menyediakan jamur lingzhi yang berbentuk teh dalam kemasan.

Produk-produk Jejamuran diolah dengan bahan baku jamur yang dipanen dari tempat budidaya milik CV Volva Indonesia. Tempat budidaya ini terdiri dari kumbung (rumah jamur) berupa bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan alumunium. Kumbung ini berukuran 3x3 meter dan di dalamnya terdapat media tumbuh jamur yang dilengkapi dengan *humidity spray* untuk menjaga kelembapan ruangan. "Tingkat kelembapan ruangan sebaiknya 70 persen agar jamur dapat tumbuh dengan baik," terang Rahmat.

Tempat budidaya ini terbuka bagi pengunjung yang ingin mengetahui cara budidaya jamur. "Tahun ini kami membuat program edukasi tentang jamur," ungkap Rahmat. Pengunjung dapat melihat proses pengomposan media tumbuh hingga proses panen jamur. Keseluruhan prosesnya digarap oleh pekerja yang merupakan masyarakat sekitar.

Untuk dapat melihat proses itu, pengunjung tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Jarak tempat budidaya hanya sekitar 800 meter dari restoran. Hal ini bertujuan agar jamur yang telah dipetik dapat segera disetor ke restoran sehingga kualitasnya terjaga. "Rentang waktu antara panen sampai tiba di dapur adalah enam hingga delapan jam, supaya jamur tetap segar sebelum diolah," ujar Rahmat.

Pertimbangan jarak restoran dengan tempat budidaya inilah yang menjadi alasan Jejamuran bertahan di satu tempat saja. Pihak restoran tidak berniat untuk membuka cabang meski Jejamuran sudah sangat dikenal masyarakat. "Lebih baik konsentrasi pada satu tempat untuk memudahkan kontrol kualitas makanan," tegas Lilik.

Kualitas memang menjadi perhatian utama pihak Jejamuran, sehingga tidak mengherankan jika restoran ini mendapat tanggapan positif dari para pengunjung. Salah satu pengunjung yang memberi respons baik adalah Undang yang berasal dari Tasikmalaya. "Rasa makanan enak dan memuaskan. Selain itu, pelayanannya juga cepat," ujarnya.

Lantaran mengedepankan kualitas produk serta pelayanan, Jejamuran tidak mengeluarkan biaya promosi yang banyak. Ketertarikan dan kepuasan pengunjung membuat restoran ini populer dengan sendirinya. Kepopuleran restoran ini membuat banyak media cetak tertarik untuk meliput. Hal ini terbukti dari beberapa bingkai potongan artikel media cetak yang dipajang pada salah satu sisi dinding restoran.

Meskipun telah populer, pihak Jejamuran tidak cepat puas. Menurut Lilik, setiap tahunnya Jejamuran selalu mencoba menciptakan menu baru. Untuk menghasilkan satu inovasi menu diperlukan eksperimen berkali-kali hingga memperoleh rasa yang sekiranya pas di lidah pengunjung. "Untuk menghasilkan rasa yang baik, memang tidak boleh asal," tegas Lilik. Dengan meningkatkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan, Lilik berharap masyarakat semakin tertarik menikmati olahan jamur di restoran ini. **[Kalyca]**



© Mima/BAL

**Sekilas, tempat ini terlihat seperti galeri jamur. Namun, ini adalah bagian restoran Jejamuran yang berlokasi di Jalan Pramuka, Niron, Pandowoharjo, Sleman.**

## Mendatar

1. Tokoh pendidikan Indonesia
3. Latar tempat film pemenang Academy Award for Best Pictures 2017
6. Akhiran (kata ganti) yang menyatakan kepemilikan
7. Tulang lengan atas manusia
9. *Orang-Orang Proyek*
11. *On the Road*
12. Bandar udara di Bangka Belitung
15. Nama depan peraih Nobel Sastra pertama dari Jepang
17. Penekanan; pengekangan; penindasan
18. Gerbang Tol Otomatis
20. Musuh
22. Babi tua dalam *Animal Farm*
23. Partai revolusioner kaum Afrika-Amerika yang terbentuk pada 1966
25. Kehilangan kendali atas fungsi tubuh
26. "3AM Spiritual"
27. Nama latin burung cendrawasih
28. Terdiri atas berbagai unsur yang berbeda
29. Nama belakang Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong

## Menurun

2. Ajaran anti kekerasan
3. Patologi tentang suasana hati yang ditandai dengan kesedihan dan depresi
4. Memulai
5. Tempat duduk pengantin
8. Nama bulan kesembilan
10. Benda atau bahan penghantar panas
13. *Matilda*
14. Penyanyi "*Sang Filsuf*"
16. *Help me get my ... back on the ground* (The Beatles, 1965)
19. Daerah pelaksanaan upacara Ma'nene
21. $^1/_2$ x m x v²
24. Kumpulan senyawa organik yang mengandung nitrogen
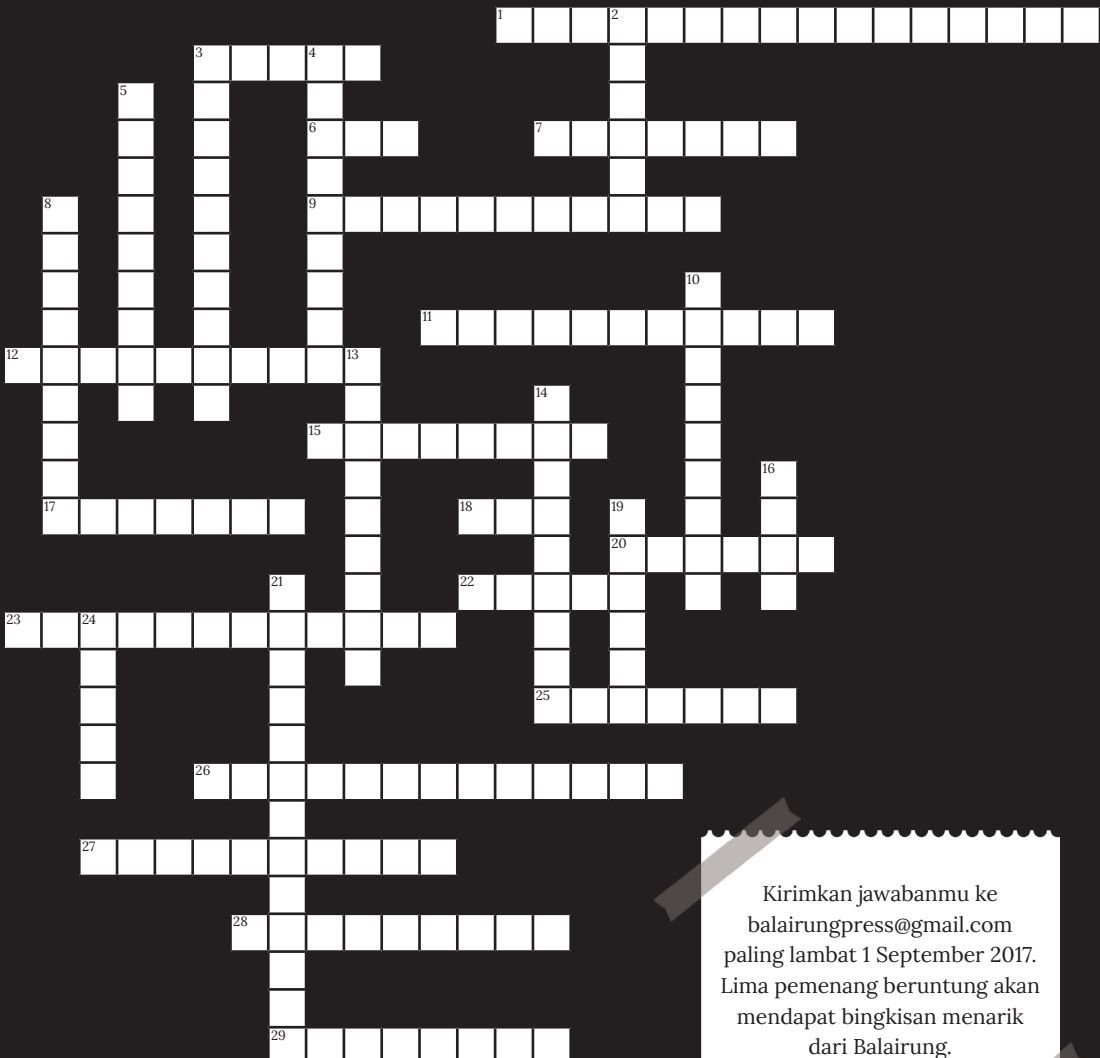
Kirimkan jawabanmu ke balairungpress@gmail.com paling lambat 1 September 2017. Lima pemenang beruntung akan mendapat bingkisan menarik dari Balairung.

# Mencari Papua's Candy

Foto dan Teks: Arjun Subarkah

*Makan pinang sudah menjadi tradisi sebagian orang Papua. Memakannya sudah seperti mengunyah permen karet saja. Dari anak kecil, remaja, hingga orang tua yang sedang bersantai santai sambil makan pinang dapat dengan mudah kita temui di kota maupun kampung di Papua. Mencari penjual pinang pun tak sulit dijumpai kala berjalan-jalan di kota-kota di Papua. Namun, dapatkah kita menjumpainya di Yogyakarta?*

LOTEK
GADO-GADO
TAHU KUPAT
NASI PECEL
NASI GORENG
MAGELANGAN
CAP CAY
BAKMI

Mencari buah bernama latin *Areca catechu L.* ini di Yogyakarta dapat dibilang perkara yang susah-susah gampang. Selain karena tradisi memakan pinang tidak sepopuler di Papua, penjualnya pun tidak menyebar. Menjadi mudah saat kita telah mengenal kawasan penjual-penjual menjajakan buah ini.

Di jalan Babarsari terdapat setidaknya tujuh penjual pinang, salah satunya seorang wanita bernama Mina Tabuni yang berasal dari Puncak Jaya. Sudah beberapa bulan ini ia melanjutkan usaha saudara perempuannya yang pulang kampung. Biasa buka dari sore jam setengah lima hingga malam sekitar jam setengah dua belas. Dagangan ini ia bagi dalam kelompokan berisi empat buah pinang, dua batang sirih, beserta kapur yang dibungkus plastik kecil, ia beri harga Rp 10.000,- saja. Jika sedang laris bisa terjual hingga lima ratus kelompokan.

“Pinang di sini besar-besar,” kata Mina saat mengetahui saya berasal dari Jayapura. Pinang ini sendiri diambil dari beberapa daerah di sekitar kota Yogyakarta, seperti Sleman, Magelang, Bantul, bahkan Solo. Sedangkan sirih dan kapur ia datangkan dengan kargo pesawat dari Kota Jayapura.

# rekrutmen terbuka

**BPPM BALAIRUNG**

# "Bhinneka Tunggal Persma"

**Narahubung:**
085643767136 (Rainhard)
parasoerama (LINE)

**Redaksi / Perusahaan / Riset / PdA**
Produksi dan Artistik

**Agustus — September 2017**

| 17-19 | 4 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Gelanggang Expo | Deadline Berkas | Open House | Tes Tulis | Tes Wawancara |

@bppmbalairung /bppmbalairungugm @bppmbalairung @GSJ9240C /balairungpress.com

**Jangan Lupa untuk mengunjungi Stand Kami di Gelanggang Expo**

**Alamat:**
Jl. Kembang Merak No. B21,
Kompleks Perumahan Dosen UGM,
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

SELAMAT DATANG DI

# ANTHROPOCENE(?)

SEGERA

JURNALBALAIRUNG

# Peran Suratimin dalam Pelestarian Hutan Rakyat

© Mirna/BAL

*Bersama dengan warga, ia merintis DKKS, usaha tersebut berhasil mengubah kawasan hutan di Desa Semoyo yang dulu gersang. Atas keberhasilannya mengajak warga untuk melestarikan hutan, sehingga ia memperoleh penghargaan Kalpataru kategori perintis di tahun 2013.*



Sebuah plang bertuliskan Radekka FM berdiri di pinggir jalan. Plang tersebut menjadi penanda ke sebuah rumah yang sekaligus menjadi tempat Radekka FM berada. Jalan menuju rumah tersebut belum diaspal, serta banyak pohon yang tumbuh di kiri dan kanan jalan. Sekitar 100 meter dari plang tampak sebuah rumah. Saat itu, suasana rumah tampak sepi, hanya terlihat beberapa mebel yang baru jadi dan peralatan untuk membuatnya.

Seorang pria keluar dari rumah lantas menyambut dengan ramah. Pria tersebut bernama Suratimin, seorang warga Desa Semoyo. Lantunan musik yang berasal dari radio turut mengiringi saat ia mulai bercerita tentang pengalamannya melestarikan hutan. "Musik yang terdengar itu berasal dari radio komunitas Desa Semoyo yaitu Radekka FM," jelas Suratimin. Radio yang didirikan pada tahun 2008 itu digunakan sebagai media untuk menyalurkan wawasan mengenai pelestarian lingkungan ke masyarakat Desa Semoyo.

Suratimin memulai kegiatan pelestarian lingkungan dengan merintis Desa Kawasan Konservasi Semoyo (DKKS) di Desa Semoyo. Ia merintis DKKS sebagai wujud keprihatinannya terhadap kondisi hutan di Gunung Kidul, terutama Desa Semoyo. DKKS yang diresmikan pada 18 Agustus 2007 itu dibentuk dengan prioritas melestarikan hutan rakyat dan menjaga sumber mata air di daerah Gunung Kidul. Atas keberhasilannya mengajak warga dalam membangun DKKS, Suratimin memperoleh penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan pada tahun 2013.

Suratimin melanjutkan ceritanya dengan menggambarkan kondisi hutan sebelum dilakukan usaha pelestarian hutan di Desa Semoyo. Kondisi hutan saat itu gersang dan sedikit ditumbuhi pohon. "Dulu, kalau duduk di depan rumah, saya bisa lihat Kota Wonosari karena jarang sekali ada pohon besar tumbuh," kenang Suratimin. Namun, keadaan memang berbeda saat ini, karena sudah banyak pohon tumbuh di wilayah Desa Semoyo. Suasana Desa Semoyo menjadi terasa lebih sejuk karena banyak pohon besar di sekitarnya. Perubahan yang terjadi merupakan hasil kerja keras Suratimin dan warga Desa Semoyo dalam melestarikan lingkungan di desanya.

Tekadnya untuk melestarikan lingkungan tumbuh saat ia melihat kondisi hutan di Desa Semoyo ketika masih di perantauan. Sepulang dari perantauan, Suratimin membuat lapangan badminton di halaman rumah supaya warga bisa bermain badminton. Saat itu setiap sore banyak warga yang hadir datang untuk bermain atau sekadar menonton permainan badminton. "Waktu itu banyak bapak-bapak kumpul di sini, jadi saya ajak mereka membentuk kelompok serikat tani dalam rangka melestarikan hutan rakyat," kenang Suratimin. Ajakan tersebut disetujui oleh warga untuk membentuk kelompok serikat tani Desa Semoyo. Anggota kelompok tersebut terdiri dari warga sekitar Desa Semoyo. "Kegiatan serikat tani yang kami lakukan meliputi pembuatan biopori, sumur resapan, *galengan*, *rolak*, dan penanaman pohon," ungkap Suratimin. Ia juga mengatakan bahwa upaya yang dilakukan tersebut untuk menampung air hujan.

Untuk menunjang kegiatan kelompok serikat tani, Suratimin membuka sekolah bagi petani di Desa Semoyo. Sekolah tersebut dinamakan Sekolah Petani Rakyat (SPR) yang diadakan setiap seminggu sekali. Kegiatannya meliputi pembekalan kepada petani mengenai cara pelestarian hutan rakyat di Desa Semoyo.

Salah satu bentuk pembekalannya ialah pengetahuan tentang cara menghitung karbon. Pengetahuan menghitung karbon tidak hanya menarik warga Desa Semoyo tapi juga masyarakat luar desa. "Dulu, orang-orang dari luar pulau pun datang ke sini untuk mempelajari cara menghitung karbon," ujar Suratimin. Pengetahuan tersebut ia peroleh dari kerja sama dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga yang bernama Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam tersebut bergerak di bidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Namun, kegiatan SPR tidak berjalan secara rutin untuk saat ini. Kegiatan hanya dilakukan ketika mereka membutuhkan pelatihan. "Sekarang SPR hanya berkumpul ketika ada kebutuhan saja, misalnya pelatihan konservasi," ujar Suratimin. Hal ini dikarenakan setiap kelompok memiliki berbagai kegiatan, seperti penanaman dan perawatan pohon, pembuatan pupuk organik, pestisida alami, dan sebagainya.

Pendidikan bagi petani juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan tebang butuh yang masih tinggi. "Salah satu masalah dalam pengelolaan hutan rakyat adalah tingkat tebang butuh masyarakat yang masih tinggi. Mereka menebang pohon yang belum layak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Suratimin. Pohon yang sudah layak tebang biasanya berusia rata-rata 35 tahun dengan diameter 50 cm.

Untuk itu, Suratimin mengajak masyarakat mengelola kayu menjadi perabotan agar nilai ekonomisnya lebih tinggi. Lantas ia membuka usaha mebel di rumahnya sebagai contoh pengelolaan kayu secara kreatif. Ia berharap warga Desa Semoyo dapat mengikuti langkahnya supaya dapat memanfaatkan hasil kayu dengan lebih baik.

Selain itu, Suratimin juga berupaya mengembangkan pendidikan bagi anak petani di Desa Semoyo. Salah satu upaya yang ia lakukan dengan membentuk Sekolah Anak Petani (SAP). Cara tersebut ia lakukan untuk mengubah pola pikir generasi muda. "Petani *kan* tidak harus mencangkul. Pola pikir seperti itulah yang ingin saya ubah di generasi sekarang melalui SAP," jelas Suratimin. Menurutnya, pendidikan tentang pertanian penting diberikan sejak dini. Sekolah yang ditargetkan bagi siswa SD dan SMP tersebut berlangsung selama dua jam setiap harinya sepulang sekolah. Tutor yang mengajar di sekolah tersebut berasal dari kalangan mahasiswa. Namun, ketika mereka berhalangan hadir, Suratimin atau salah satu keluarganya siap menggantikan menjadi tutor.

Meskipun istri dan keluarga turut membantu Suratimin dalam SAP, beberapa kali ia menerima keluhan dari keluarganya. Suratimin mengatakan, sebelumnya istri dan anaknya kurang mendukung saat ia melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. "Keluarga akan selalu mendukung kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, meskipun harus menunggu beberapa waktu untuk mendapat dukungan itu," kata Suratimin.

Dalam sela-sela perjuangan melestarikan hutan, Suratimin mengikuti beberapa perlombaan di bidang lingkungan. Perlombaan yang ia ikuti di antaranya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan pemilihan kader konservasi. Perlombaan-perlombaan tersebut sukses ia menangkan. Namun, juara bukan menjadi tujuan Suratimin, tujuan Suratimin mengabdi adalah berguna bagi lingkungan. "Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, saya mempunyai prinsip untuk selalu melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan," pungkasnya.

Suratimin juga mengimbau generasi muda agar mampu mengembangkan potensi demi kebaikan bersama. Ia mengajak mahasiswa agar mau berinteraksi dengan masyarakat desa. "Sebagai generasi muda, sering-seringlah berkunjung ke desa, ngobrol dengan masyakat desa agar tahu keluh kesah mereka," ujar Suratimin. Ia juga sering heran dengan perilaku mahasiswa sekarang. Salah satunya dengan program kuliah kerja nyata, di mana mahasiswa hanya mampu memasang plang-plang penunjuk tempat di Desa Semoyo. "Mahasiswa seharusnya mampu memikirkan ide yang lebih besar daripada hanya memasang plang di desa," pungkasnya sambil tersenyum. **[Hutri, Rio]**
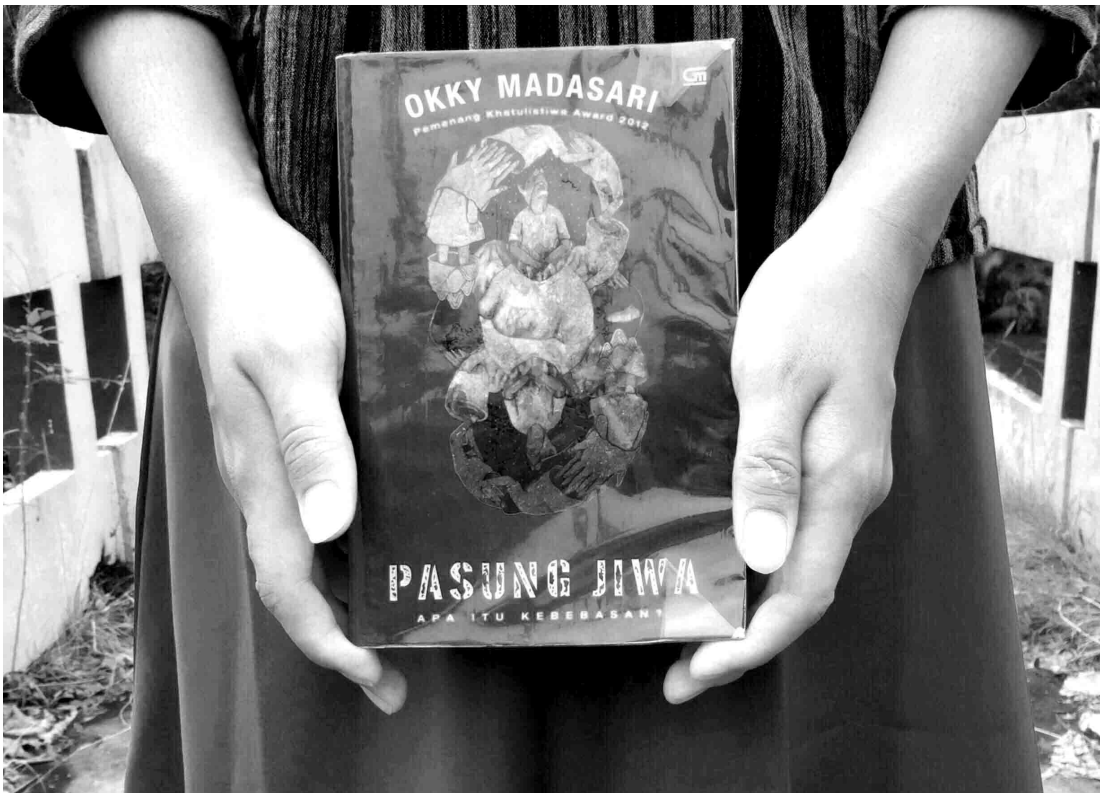
© Lidya/BAL



# Budaya Kekerasan di Balik Jiwa yang Terpasung

Judul
Pasung Jiwa
Penulis
Okky Madasari
Penerbit
Gramedia Pustaka Utama
Tebal buku
321 halaman
Tahun terbit
2013

Umumnya saat kita mendengar kata kebebasan yang tergambar dalam ingatan kita adalah melakukan suatu hal sesuka hati tanpa hambatan dan larangan. Akan tetapi setiap orang mempunyai arti kebebasan tersendiri. Beberapa orang mengartikan bahwa ia benar-benar merasa bebas saat tak ada tumpukan tugas di mejanya atau berlibur ke tempat yang diinginkan. Sedangkan yang lain menganggap menjadi diri sendiri saja sudah merupakan bentuk dari kebebasan. Sayangnya, sebagian orang menganggap beberapa kebebasan yang dilakukan orang lain mengganggu kenyamanan atau tidak sejalan dengan apa yang dianut dalam masyarakat.

Batas kebebasan kerap diukur oleh kaum yang memegang andil besar atau mayoritas masyarakat. Novel *Pasung Jiwa* ini menyuguhkan suasana cerita di mana menggambarkan kekangan kebebasan yang dialami oleh dua laki-laki sebagai tokoh utama yaitu Sasana dan Jaka. Dunia kebebasan yang diidamkannya adalah dunia mereka bebas berekspresi sesuai dengan panggilan jiwanya. Jiwa Sasana sesungguhnya tampak melalui gaya busana dan tata laku perempuan, berbeda dengan Jaka yang ingin lepas dari tekanan hidup yang dialaminya.

Kebebasan seperti yang diinginkan Sasana ini kerap kali dihentikan dengan cara kekerasan dan intimidasi karena tidak selaras dengan norma yang berlaku. Kekerasan yang umum kita ketahui adalah kekerasan langsung melalui kontak fisik. Namun, menurut Galtung, seorang sosiolog, kekerasan dapat terjadi dalam situasi yang tidak disadari sekalipun.

Kekerasan tersebut adalah kekerasan struktural dan kultural yang tergambar dalam kisah yang dialami tokoh dalam novel.

Melalui sudut pandang orang pertama, atmosfer kekerasan yang dialami Sasana dan Jaka terasa. Kekerasan langsung secara fisik mulai diterima Sasana saat ia bersekolah. Salah satu geng di sekolah kerap memukulnya. Saat Sasana terjaring oleh aparat keamanan bersama Jaka di Malang, tubuh waria Sasana kerap mendapat penyiksaan dan pelecehan seksual dari aparat yang menangkapnya. Jaka atau "Cak Jek" juga mendapatkan kekerasan di dalam penjara akibat aksi unjuk rasa bersama Sasana.

Kekerasan langsung dan struktural di atas berangkat dari suatu kondisi sosial yang membudaya. Pada konteks ini, kultur atau budaya dipahami sebagai nilai atau norma yang menjadi pijakan dalam menilai suatu hal sebagai hal yang baik. Prasangka dan stereotip pun menjadi dasar penilaian baik dan buruk dengan pemberian label terhadap kelompok tertentu dengan asosiasi sifat tertentu. Satu pihak menilai bahwa pihak lain bersifat buruk karena bertindak menyalahi nilai dan norma.

Lalu bagaimana wujud kekerasan kultural? Di dunia *Pasung Jiwa* dan kehidupan nyata di Indonesia, masyarakat hanya melihat dua jenis kelamin yang sesuai dengan peran sosial. Perempuan bersikap feminin dan laki-laki bersikap maskulin. Sasana, seorang laki-laki, menjadi anomali atas ketetapan tersebut setelah berubah menjadi Sasa. Sebagian besar masyarakat memiliki stereotip bahwa keberadaan Sasa, transgender, menjadi penyimpang yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, Jaka yang bergabung di dalam ormas memiliki gagasan untuk memberikan kekerasan kepada Sasana. Keberadaan gagasan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan sebagai penyelesaian masalah yang membudaya dalam pikiran.

Di Indonesia, saat ini intoleransi menjadi salah satu wujud kekerasan yang dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prasangka dan stereotip yang bersifat negatif masih melingkupi masyarakat Indonesia yang beragam. Sebagaimana yang dikatakan Okky dalam buku ini, "Kalian semua harus dikeluarkan dari lingkungan mereka, hanya karena kalian berbeda." Dengan demikian, satu kelompok menganggap kelompok lain sebagai lawan karena perbedaan nilai dan norma satu sama lain.

Anggapan ini mendorong satu pihak untuk menegakkan nilai dan norma yang dianut dengan cara menghukum pihak lain. Hukuman yang paling mudah diberikan adalah hukuman fisik, seperti pemukulan dan perusakan jiwa, raga, serta infrastruktur. Bahkan tindakan salah satu pihak yang didaulat sebagai upaya penegakan nilai dan norma mendapatkan legitimasi dari jajaran pemerintah yang memiliki kekuasaan secara struktural.

Dalam kekerasan tersebut, pihak yang melakukan kekerasan mencitrakan diri sebagai figur pahlawan yang mempertahankan nilai tatanan sosial. Lambat laun masyarakat menerima citra tersebut karena telah dibangun anggapan bahwa nilai dan norma merupakan hal yang mutlak dan perlu dijaga oleh sekelompok orang. Penerimaan tersebut menunjukkan adanya normalisasi kekerasan di masyarakat. Sebagai contoh, oknum ormas yang berkedok sebagai pembela dan penegak nilai-nilai agama menjadi pelaku kekerasan dan tidak jarang mendapatkan dukungan dari masyarakat atau pun oknum negara dalam bertindak.

Dengan demikian, baik di dunia *Pasung Jiwa* maupun di kehidupan nyata kekerasan dijadikan sebagai cara dan alat yang menunjukkan kekuasaan pelaku kekerasan yang telah mendapatkan citra sebagai 'pahlawan'. Tindakan yang menjadi penegas sang pahlawan di

> *Semua orang bebas berekspresi, semua orang bebas melakukan apapun. Namun, kekerasan membungkam kata-kata tersebut ketika terbentur dengan nilai dan norma dalam masyarakat.*

atas pihak lain sehingga dapat memberikan kekerasan pihak yang dianggap berada di bawah, yaitu 'para pendosa'. Padahal, kekerasan merupakan bentuk bahwa pelaku tidak memiliki kekuasaan. Hannah Arendt (1969), seorang ilmuwan politik, mengungkapkan bahwa pihak yang memilih kekerasan sebagai pilihan menunjukkan kekuatan pihak tersebut sedang terancam.

Kesadaran mengenai kekerasan yang masih terdapat di masyarakat Indonesia dapat dihidupkan oleh *Pasung Jiwa*. Buku ini menggunakan pergolakan batin dua individu dalam merefleksikan kondisi sosial yang mereka hadapi. Namun, di dalam penceritaan pergulatan yang dialami oleh kedua individu tidak berimbang. Penulis lebih banyak menceritakan proses hidup Sasana daripada Jaka. Dengan demikian, pembaca kurang memahami latar belakang pergulatan yang dialami Jaka dalam mencari kebebasan. **[Theo, Tias]**

© Rusmul/BAL
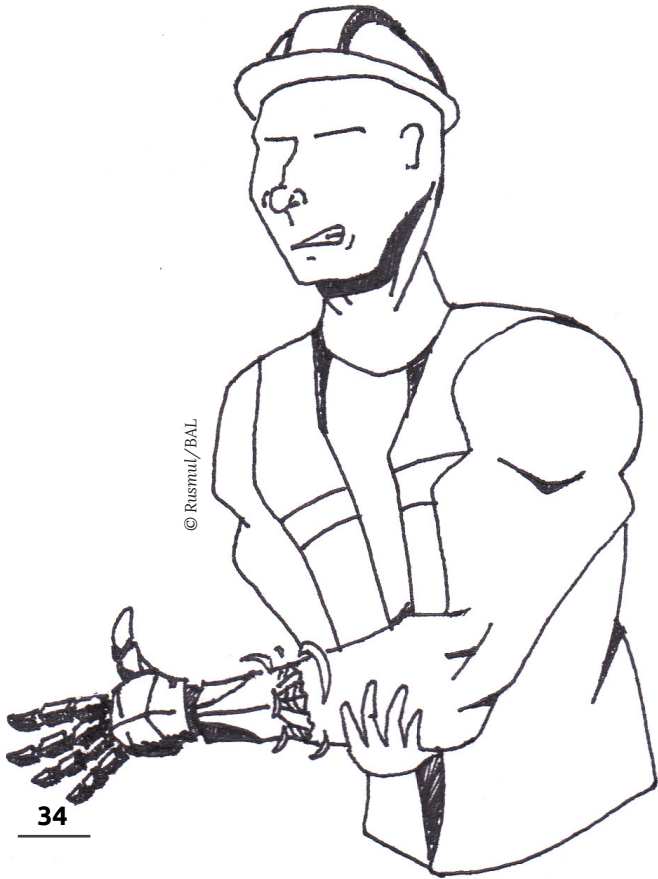
# Masa Depan Lapangan Pekerjaan di Era Otomatisasi

*Otomatisasi diperkirakan akan membuat jumlah lapangan pekerjaan manusia semakin menipis di masa depan. Langkah antisipatif dibutuhkan dalam menanggapi peristiwa tersebut.*

Perkembangan otomatisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan manusia. Otomatisasi dipercaya mampu mengubah kondisi lapangan pekerjaan manusia di masa depan. Berdasarkan artikel berjudul "Automation and Anxiety" (2016) yang dilansir oleh situs *The Economist*, terdapat beberapa teknologi yang sampai saat ini dinilai mampu menggantikan pekerjaan manusia di masa depan. Salah satu bukti yang konkret adalah pengembangan mobil dengan pengendali otomatis. Pengembangan teknologi tersebut semakin mempersempit kesempatan kerja para sopir di masa depan. Tidak hanya pada mobil, pengembangan serupa juga diprediksi akan dapat ditemukan pada sarana tranportasi lainnya seperti sepeda motor, bus, hingga pesawat. Hal ini membuat otomatisasi dalam skala besar akan mempengaruhi kondisi lapangan pekerjaan di masa depan.

Pengertian otomatisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin yang secara otomatis dapat melakukan dan mengatur pekerjaan. Sesuai dengan prinsip ekonomi, pemilik faktor produksi akan berusaha menekan biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, mengganti tenaga kerja manusia dengan teknologi menjadi suatu pilihan yang logis untuk dilakukan. Dengan kata lain, para pemilik faktor produksi memiliki urgensi untuk melakukan otomatisasi. Berdasarkan artikel "I Don't Think We Can Stop It: The Future of Automation and Job Loss" (2016) yang dimuat dalam situs *The Futurism*, hal ini membuat otomatisasi dalam skala besar akan menjadi tidak terelakkan.

Berdasarkan artikel "The 4th Industrial Revolution and a Jobless Future—A Good Thing?" (2017) di situs *The Forbes*, otomatisasi dalam skala besar di masa depan dipercaya dapat menimbulkan krisis lapangan pekerjaan bagi manusia. Carl Benedict Frey dan Michael Osborne dalam publikasi yang berjudul "The Future of Employment" (2013) yang dirilis oleh Universitas Oxford menyatakan bahwa tingkat kerentanan suatu pekerjaan terhadap otomatisasi dipengaruhi seberapa repetitif pekerjaan tersebut. Terdapat tiga jenis pekerjaan yang rentan terhadap otomatisasi, yakni pekerjaan di bidang logistik dan transportasi, bidang pendukung kantor, serta bidang penjualan dan pelayanan. Beberapa di antaranya adalah akuntan, kasir, dan juga resepsionis.

Frey dan Osborne juga menyatakan bahwa pekerjaan yang memerlukan kreativitas dan keahlian

khusus, seperti pelukis hingga ahli desain, tidak akan terlalu dipengaruhi oleh otomatisasi. Menurut Derajad Sulistyo Widhyarto, S.Sos., M.Si., dosen di Departemen Sosiologi UGM, pasca-fordisme telah menjadi orientasi baru dalam dunia pekerjaan. "Pasca-fordisme adalah keadaan dimana orang tidak lagi bekerja dalam konteks manufaktur rutin, tetapi orang bekerja berdasarkan kesenangan," ungkap Derajad. Pasca-fordisme muncul akibat berubahnya mode produksi dan distribusi akibat pengaruh otomatisasi.

Otomatisasi dalam skala besar di masa depan dipercaya akan mendatangkan reaksi yang cukup beragam dari masyarakat. Dalam artikel "Automation and Anxiety" disebutkan bahwa masyarakat akan menujukkan dua reaksi yang menonjol dalam menghadapi otomatisasi, yakni pesimis dan optimis. Kelompok pesimis meyakini bahwa otomatisasi di masa depan akan membuat banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan secara kolektif. Lawrence Summers, direktur Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat, mengemukakan kekhawatirannya atas kemungkinan dampak otomatisasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh program pendidikan dan pelatihan yang dinilai sangat kaku terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, menurut Derajad, otomatisasi di masa depan akan lebih memengaruhi kelompok tenaga kerja di negara-negara berkembang daripada di negara maju. "Gejolak yang lebih besar itu dirasakan oleh negara berkembang, karena proses produksi negara-negara maju itu sudah dipusatkan di negara-negara berkembang," tutur Derajad.

Kondisi ini membuat Robert Skidelsky, dalam tulisan berjudul "The Second Machine Age is Upon Us: Time To Reconsider The Luddites?" (2014) yang dirilis oleh situs *The Guardian*, meyakini bahwa kelompok *luddites* mungkin akan muncul kembali di masa depan. Berdasarkan artikel berjudul "Is it O.K. to be a Luddite?" (1984) yang dilansir dalam situs *The New York Times*, terminologi *luddite* digunakan untuk menyebut para pekerja tekstil yang menentang perkembangan teknologi yang dianggap merebut lahan pekerjaan di abad ke-19. Para *luddite* dikritik karena dinilai terlalu pesimis dan berlebihan. Pasalnya beberapa tahun kemudian otomatisasi tersebut menciptakan gelombang pekerjaan baru bagi para tenaga kerja.

Di sisi lain, kaum optimis memiliki keyakinan bahwa, sama seperti fenomena revolusi industri di abad ke-19, masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat otomatisasi akan mendapatkan pekerjaan lain dengan atau tanpa bantuan otomatisasi itu sendiri. Berdasarkan artikel yang dirilis dalam *The Washington Post* dengan judul "Yes, The Robots Will Steal Our Jobs and That's Fine" (2016), teknologi hanya berfungsi sebagai barang pelengkap pekerjaan manusia. Hilangnya pekerjaan dinilai bukan menjadi suatu halangan terhadap munculnya lapangan pekerjaan lain. Kaum ini memiliki anggapan bahwa manusia akan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman, begitu pula preferensi pekerjaan di masa depan.

Meski terdapat beragam reaksi yang mungkin ditunjukkan oleh masyarakat, langkah antisipasi sudah selayaknya dikerahkan. Salah satunya, menurut Derajad, adalah dengan merilis daftar preferensi pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh pasar secara berkala. Melalui program tersebut, pemerintah dapat membantu masyarakat dalam membaca permintaan pasar, sehingga dapat meminimalkan potensi meningkatnya angka pengangguran di masa depan akibat otomatisasi. Menurut Derajad, program ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengorganisasi masyarakat menjadi lebih kompeten di bidang pekerjaan yang diinginkan.

Tidak hanya itu, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *universal basic income*. Dalam artikel berjudul "Is Finland's Basic Income a Solution to Automation, Fewer Jobs, and Lower Wages?" (2017) yang dirilis oleh *The Guardian*, pemerintah dapat mempertimbangkan pengimplementasian kebijakan *universal basic income* dalam mengantisipasi otomatisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan upah minimum bagi setiap masyarakat. Dalam kaitannya dengan dampak jangka panjang otomatisasi, kebijakan ini diharapkan mampu menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contoh keberhasilan penerapan *universal basic income* dapat ditemukan di Alaska dan Namibia. Tingkat kemiskinan di kedua wilayah tersebut telah berhasil dikurangi masing-masing 6% dan 18% melalui penerapan kebijakan tersebut.

Fenomena otomatisasi lapangan pekerjaan dalam skala besar akan terjadi cepat atau lambat. Proyeksi bahwa pekerjaan-pekerjaan repetitif akan menghilang juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindakan antisipatif dari pemerintah menjadi perlu untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin muncul setelahnya. Penerapan program penerbitan daftar pekerjaan secara berkala hingga kebijakan *basic income* dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut bagi pemerintah dalam mengantisipasi fenomena otomatisasi. **[Nadya]**

© Arjun/BAL



# Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Roem Topatimasang

Saat ini, sekolah seakan telah bergeser dari hakikatnya. Pada awalnya, sekolah tidak memiliki tempat yang tetap dan bisa digelar oleh siapapun. Namun, sekolah telah menjadi institusi resmi yang memiliki aturan sendiri dan seakan menjadi keharusan bagi siapa saja. Padahal, sekolah tidak dapat menjadi tolok ukur kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Jika demikian, masih bisakah sekolah dikatakan sebagai satu-satunya sarana untuk mencerdaskan seseorang? Itulah yang menjadi keresahan Roem Topatimasang dalam salah satu bukunya, *Sekolah itu Candu*.

Roem, yang saat ini menghabiskan masa senjanya dengan menjadi penulis dan penerjemah buku, pernah melakukan beberapa eksperimen pendidikan kritis di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setelah itu, ia mengasingkan diri di Indonesia Timur dan menciptakan pendidikan alternatif. Melalui program-program pendidikan kerakyatan inilah, ia mencoba memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

Ditemui di kediamannya yang terletak di lereng Gunung Merapi, Tim Balairung berkesempatan berbincang dengan Roem yang sempat menjadi mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung. Selepas azan magrib berkumandang, beliau menceritakan gagasannya terhadap pendidikan di Indonesia. Berikut petikan pembicaraan yang dihidangkan dalam senja dan ditemani oleh secangkir teh hangat.

**Apa yang membuat Anda tergerak untuk menggeluti pendidikan kerakyatan? Bagaimana awal mulanya?**

Aktivitas saya dalam dunia pendidikan berawal dari keresahan bahwa ada yang salah dengan dunia pendidikan kita. Kemudian, kami melakukan eksperimen dengan beberapa teman. Eksperimen pertama dilakukan di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang. Kami membuat satu program selama satu bulan untuk santri aliah tingkat tiga yang akan menyelesaikan studinya.

**Metode pengajaran seperti apa yang anda terapkan dalam eksperimen tersebut?**

Jadi kami ubah cara berpikir para santri dengan beberapa pertanyaan dasar dan pengamatan lapangan. Contohnya adalah ketika kami pergi ke suatu tempat untuk melakukan pengamatan lapangan. Saya memancing mereka dengan pertanyaan mudah, seperti apa saja yang kalian

gunakan untuk mengamati? Jawaban yang muncul adalah mata dan telinga. Lalu saya bertanya lagi, berapa jumlah panca indera yang kalian miliki? Mengapa hanya dua yang kalian gunakan?

Dari situ, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya banyak fakta yang bisa kita ketahui tidak hanya lewat mata dan telinga. Semua panca indera bisa digunakan untuk menangkap fakta. Dengan menggunakan semua panca indera, kepekaan kita akan terbangun. Sehingga, kita akan mendapatkan lebih banyak fakta di lapangan. Proses tersebut tidak ada di pendidikan formal, termasuk melatih indera keenam atau intuisi.

Karena ketiadaan itu, anak-anak zaman sekarang tidak saling memberi kesempatan berbicara. Maksudnya, tiap orang membawa ego besar dalam percakapan dan tidak menyimak satu sama lain. Itulah yang menyebabkan kedangkalan pikiran. Jika antar orang saling mendengarkan, maka akan muncul empati yang dapat mendidik dan melatih kepekaan terhadap orang lain. Nah, kebiasaan inilah yang sudah hilang.

**Apakah hal tersebut terjadi karena perkembangan zaman? Ataukah sudah ada sejak dahulu tetapi belum terlihat seperti saat ini?**

Sebenarnya hal ini disebabkan oleh banyak hal. Sebab yang paling mendasar adalah pikiran bahwa pendidikan bertujuan untuk menjadikan seseorang seperti keinginan khalayak umum. Akibatnya, apa yang dianggap baik untuk kita akan baik pula untuk orang lain, padahal belum tentu begitu. Misalnya, ukuran sopan dan tidak sopan itu ukuran dari siapa? Sopan di Jawa belum tentu sopan di Papua.

Anak Papua dan Maluku diajarkan sopan santun versi Jawa karena kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Jawa. Saya tidak bermaksud mengatakan yang di Jawa itu salah. Tetapi lokalitas jangan diajarkan menjadi nilai universal bagi orang di tempat lain. Intinya itu bagaimana mendidik dengan memahami dirinya yang nyata. Hanya dengan begitu, orang bisa membangun citra dirinya.

**Lantas, apakah bisa dikatakan bahwa pendidikan formal kita tidak universal?**

Universal itu apa?

**Bisa diterapkan pada semua daerah?**

Itu pengertian yang salah. Pendidikan dapat disebut universal apabila hanya memuat ilmu secara umum seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, ilmu sosial, dan bahasa. Kebutuhan pendidikan di Papua tentu berbeda dengan di Jakarta, begitu pula sebaliknya. Apabila hanya mengandalkan kesamaan dalam pemerataan pendidikan, diskriminasi akan muncul dalam ranah pendidikan.

Oleh karena itu, hadirlah universitas sebagai tempat di mana orang bisa belajar apa saja tanpa sekat. Universitas itu sebenarnya dibangun untuk memfasilitasi orang belajar, bukan dikotak-kotakkan. Disiplin ilmu yang dibagi-bagi itu hanya untuk administrasi saja. Dengan demikian kehadiran universitas mampu menjadi wadah bagi setiap orang untuk mengenal lintas disiplin ilmu.

**Apakah secara tidak langsung itu berarti sejak dulu sudah terjadi kesalahan dalam sistem pendidikan formal di Indonesia?**

Bisa dikatakan demikian. Sekolah-sekolah kita merupakan warisan kolonial, di dalam kolonialisasi tersebut terkandung unsur diskriminasi. Dulu, ada sekolah yang hanya bisa diakses oleh kalangan bumiputra, misalnya Sekolah Ongko Loro untuk anak petani. Lalu, ada Hollandsch-Inlandsche School, sebuah sekolah Belanda yang dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Memang tidak ada ketentuan tertulis tentang penempatan orang berdasarkan status sosialnya. Ini adalah sebuah sistem yang menimbulkan pelapisan sosial dalam masyarakat.

Sekolah-sekolah kita merupakan warisan kolonial, di dalam kolonialisasi tersebut terkandung unsur diskriminasi. Dulu, ada sekolah yang hanya bisa diakses oleh kalangan bumiputra, misalnya Sekolah Ongko Loro untuk anak petani. Lalu, ada Hollandsch-Inlandsche School, sebuah sekolah Belanda yang dikhususkan untuk kalangan bangsawan.

**Lalu, bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang sudah terlepas dari kolonialisasi, khususnya di Indonesia Timur?**

Saya tidak mengetahui secara pasti keadaan di Indonesia Timur karena telah lama tidak mengakses. Namun, tetap terjadi kesalahan sistem yang ditunjukkan dengan adanya diskriminasi. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan Ujian Nasional yang terlihat sebagai pemisah wawasan yang begitu curam antara anak Jakarta dengan Papua. Dimulai dari kecuraman inilah, mobilitas sosial terhambat dan kesempatan bagi munculnya diskriminasi juga semakin besar. Sebenarnya, diskriminasi dapat diminimalisasi jika memperhitungkan kekhasan daerah dan lokalitas dalam menjaga nilai kearifan lokal. Hal tersebut patut diapresiasi dan diwujudkan dalam edukasi setempat yang mengutamakan prinsip kerakyatan.

**Bagaimana Anda memandang upaya mahasiswa dari luar Pulau Jawa yang belajar ke daerah pusat studi, seperti Yogyakarta? Apakah hal ini berkaitan dengan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah?**

Wajar saja jika orang Papua, Maluku, dan beberapa daerah lainnya ingin belajar ke daerah pusat studi. Lagipula sistemnya sudah dibuat seperti itu, lembaga pendidikan yang lengkap dibangun di tempat-tempat tertentu. Namun, yang perlu dikritik dan dipertanyakan adalah mengapa pemerintah tidak membuat universitas bermutu di pedalaman Papua seperti yang ada di daerah pusat studi. Itu lebih baik daripada harus mengalokasikan banyak sekali dana untuk memberangkatkan satu orang. Ini merupakan masalah kompleks dengan masing-masing kepentingan di dalamnya. Maka dari itu, tidak heran jika banyak mahasiswa merantau jauh-jauh, orang tempat pendidikan bagus saja tidak dibuat di sana! **[Pam]**

© Barri/BAL

# Seni Jadi Media Aspirasi dan Advokasi Orang Tuli

> *Seni menjadi media komunikasi dan advokasi teman-teman Tuli di tengah diskriminasi oleh masyarakat serta keterbatasan layanan di ruang publik*

Ada sebuah lukisan terpampang di pojok dinding ruang tamu sekretariat Deaf Art Community (DAC) yang terletak di Jalan Langenarjan Lor 3, Panembahan, Kraton Yogyakarta. Salah satu lukisannya bertuliskan, "Aku Si Ulat yang Berjuang Menjadi Kupu-Kupu" dengan latar belakang warna langit sore senja. Di sampingnya terbingkai sebuah lukisan dengan ukuran yang terbesar. Pada lukisan tersebut terdapat tiga kupu-kupu bertengger pada seikat anggur serta butiran air dengan refleksi gurun pasir di dalamnya. Ketiga kupu-kupu tersebut berjenis *red lacewing*, *monarch butterfly*, dan *australian painted lady*. *Red lacewing* dan *monarch butterfly* mempunyai ciri khas pada bagian dalam sayapnya, oranye diselimuti warna hitam. Sedangkan, *australian painted lady*, mempunyai warna coklat muda dan oranye secara acak pada bagian dalam sayapnya.

Berdasarkan penuturan Arief Wicaksono, pendamping dan penasihat DAC, lukisan itu mengisahkan kupu-kupu yang bisa terbang bebas dengan sayap indahnya. Kupu-kupu yang berjuang pada lukisan tersebut melambangkan orang Tuli yang berusaha menjalani kehidupan tanpa hambatan. Padahal, kupu-kupu berawal dari telur yang tidak memiliki daya untuk berbuat apa-apa. "Hal tersebut yang menjadi filosofi bagi DAC yang diibaratkan seperti kupu-kupu," ungkap Arief.

DAC merupakan bagian komunitas Tuli yang mengadvokasi hak-hak orang Tuli melalui beragam jenis kesenian. Beberapa advokasi melalui seni yang dilakukan DAC yaitu teater, tari, musik, dan menyanyi dengan bahasa isyarat. DAC didirikan oleh Galuh Sukmara Soejanto pada 2004 saat ia masih berkuliah di Fakultas Psikologi UGM. Awalnya komunitas ini bernama Matahariku Social Voluntery. Namun, pada tahun 2006 komunitas ini berganti nama menjadi DAC dengan lebih fokus pada kegiatan kesenian.

Menurut Gustian Hafidh Mahendra, selaku Pilot DAC, walaupun banyak yang menganggap Tuli sebelah mata, hal itu akan mendorong mereka untuk selalu berjuang melawan

keterbatasan. Seorang Tuli merasa didiskriminasi dari orang terdekat dengan dibatasi pergaulan dalam bersosialisasi. Lanjut Hafidh, orang Tuli tidak ingin menyebut dirinya sebagai tunarungu karena secara terminologi lebih bersifat negatif yang menyebabkan semakin banyaknya diskriminasi. Sedangkan, dalam hal penulisan, Tuli diawali menggunakan huruf besar karena lebih pada perspektif sosial budaya kelompok minoritas linguistik. Orang Tuli memang memiliki budaya Tuli yang berbeda dengan budaya Orang Dengar. Adhi Kusumo Bharoto mengatakan pada *kumparan.com* (13-02) bahwa ini disebabkan perbedaan cara berkomunikasi, Tuli menggunakan bahasa isyarat dan Orang Dengar menggunakan bahasa suara. Maka dari itu budaya Tuli yang termasuk kelompok minoritas linguistik menyebabkan mereka sering terdiskriminasi.

Menurut Arief, bakat seni yang menjadi kelebihan mereka digunakan untuk membuat masyarakat tidak meragukan kemampuan mereka. Ini dibuktikan dengan keikutsertaan DAC dalam beberapa pameran, seperti pameran Topeng Lukis yang diadakan oleh Dinas Sosial dan melibatkan Creative Difable Enterprise (CDE). "Seni menjadi media bagi teman-teman Tuli mengasah kemampuan dan bakatnya untuk membuktikan bahwa dirinya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam masyarakat," terangnya melalui juru bahasa. Ramadhany Rahmi sebagai juru bahasa selanjutnya menceritakan bahwa lukisan teman-teman Tuli ini menggunakan beragam aliran seni seperti realis, kartun, serta tema perjuangan mengenai hak-hak Tuli.

Proses berkesenian dengan teater dibimbing langsung oleh pendamping DAC sekaligus sutradara, yaitu Broto Wijayanto. Contoh pementasan DAC yang pernah ia sutradarai adalah "Aku Juga Anak Adam dan Hawa", "Aku Ingin Menjadi Kupu-Kupu" hingga pentas di "Festival Pantomim Yogyakarta". "Teater 'Aku Juga Anak Adam dan Hawa' menggambarkan keinginan teman-teman Tuli untuk dianggap sama seperti halnya manusia normal lainnya," terang Arief.

Teater yang dilakukan pada awal tahun 2010 itu pementasannya dibantu oleh Beatboxing of Jogja (BEJO) sebagai tata suara. Pada awalnya, latihan untuk pementasan teater oleh DAC yang diiringi BEJO mengalami kesulitan. Pasalnya teman-teman Tuli belum terbiasa bermain teater dan tari dengan iringan *beatbox*. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka terbiasa dengan getaran yang dapat mereka rasakan melalui indra peraba. Menurut Gigih Jihada selaku mantan ketua komunitas BEJO, gerakan yang dihasilkan akhirnya bisa selaras dengan tempo yang dimainkan oleh teman-teman *beatbox*.

Gigih merasa terinspirasi sejak bekerjasama dengan DAC. Menurutnya semangat teman-teman Tuli dalam berkarya sangat tinggi. Ia berpendapat suatu kehebatan tersendiri ketika teman-teman Tuli bisa berlatih tari tanpa mendengarkan musik. Gigih juga menambahkan bahwa orang yang bisa mendengarkan musik saja belum tentu bisa menari. "Bagi saya itu sudah membuktikan kesungguhan teman-teman Tuli dalam berkarya," imbuh Gigih

Judul teater DAC yang sering dipentaskan adalah "Aku Ingin Menjadi Kupu-Kupu". Arief mengungkapkan alasan mengusung judul ini karena ingin menunjukkan bahwa kekurangan yang dimiliki teman-teman Tuli tidaklah menghalangi mereka untuk terbang bebas layaknya kupu-kupu. "Keinginan melepas hambatan dan belenggu dilakukan dengan mengekspresikannya ke dalam seni," terang Arief.

Teman-teman Tuli tidak hanya bermain teater, tetapi juga bermain musik. Namun, alat musik yang digunakan adalah alat musik yang memiliki getaran kuat seperti kendang dan *djembe*. Keunikan alat musik tersebut yaitu dapat dirasakan getarannya dengan indra peraba teman-teman Tuli. "Keberadaan suara dapat dirasakan, karena teman-teman Tuli memanfaatkan getaran yang hadir tanpa mendengarnya," jelas Arief.

Seni yang selanjutnya dipentaskan adalah tari tradisional dan tarian *hip hop*. Arief menuturkan bahwa tari tradisional awalnya pernah diajarkan oleh senior di DAC dan dipentaskan pada teater. Namun, semakin lama, tarian *hip hop* lebih diminati dan dipraktikkan oleh teman-teman Tuli. Hal ini didukung pula dengan *beatbox* pengiring mereka. Arief melanjutkan, mereka kerap diundang dalam acara semi-formal seperti contohnya pembukaan program *multi level marketing*. Madha menambahkan bahwa kelebihan teman-teman Tuli adalah ketika tarian diajarkan, mereka dapat dengan mudah menirukan dan menghafal.

Dalam budaya Tuli, terdapat pula seni menyanyi. Di dalam DAC sendiri, menyanyi bukanlah hal baru. Menyanyi yang dimaksud tentu bukan dengan suara, melainkan dengan gerak tubuh dan mimik wajah. Kemampuan ini teman-teman Tuli peroleh dari Galuh karena ia mendapat pengetahuan pelatihan menyanyi dengan isyarat di Jepang. Proses menyanyi dimulai dengan memilih lagu atau lirik yang ingin dibawakan, lalu membuat gerakan dari lirik yang telah didapat. Selanjutnya adalah menyesuaikan suasana lagu dengan pengekspresian mimik wajah.

Arief berharap bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh DAC dapat membuat masyarakat atau pemerintah semakin mengenal dan dekat dengan orang-orang Tuli. Sering kali karena hal tersebut, teman-teman Tuli tidak mendapatkan haknya. Menurut Arief, teman-teman Tuli sering mendapatkan informasi yang terbatas di ruang publik. Sering kali fasilitas publik memiliki informasi umum yang hanya berupa audio dan tidak disertai penanda visual atau petunjuk jalan maupun lokasi di suatu tempat. Arief berharap, "Pemerintah dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan akses dalam ruang publik untuk orang-orang Tuli." **[Afal, Eva]**

© Deny/BAL



# Upaya UGM dalam Peningkatan Publikasi Ilmiah

*Pemerintah berupaya mendorong para dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya melalui Permendikti Nomor 17 Tahun 2017. Menanggapi peraturan tersebut, UGM memberikan bantuan terkait publikasi karya ilmiah dosen*

Jumlah publikasi jurnal ilmiah di Indonesia saat ini masih relatif minim. Data dari *scimagojr.com* menunjukan bahwa Indonesia hanya mampu mempublikasikan 6.280 jurnal internasional pada tahun 2015. Jumlah tersebut masih tertinggal dari Malaysia, Singapura dan Thailand, yang masing-masing mempublikasikan 23.414, 17.976 dan 11.632 jurnal. Selain itu, tingkat sitasi per artikel dari Indonesia hanya bernilai 0,25. Menurut penuturan Yuny Erwanto S.Pt., M.P., Ph.D., Dosen Fakultas Peternakan UGM, tingkat sitasi menunjukan *impact factor* atau pengaruh dan kualitas dari artikel yang skornya berkisar dari 0,1 sampai 40. "*Impact factor* di Indonesia setidaknya bernilai lebih dari satu untuk dikatakan bagus, sedangkan standar di luar negeri bernilai tiga," ujar Yuny.

Pada tahun 2016, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnal yang dihasilkan dari penelitian di perguruan tinggi, pemerintah menaikkan dana riset hingga seratus persen. Harapannya, perguruan tinggi di Indonesia dapat masuk ke dalam daftar lima ratus perguruan tinggi terbaik di dunia. Dilansir dari laman *tirto.id* (11-07-16), Prof. Didik Sulistyanto, selaku Peninjau Hibah Penelitian Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), mengatakan bahwa publikasi jurnal dalam bahasa Inggris merupakan salah satu kunci agar penelitian dosen-dosen Indonesia dapat diakui secara internasional.

Demi mendorong pencapaian publikasi internasional tersebut, Kemenristekdikti menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permendikti) Nomor 20 Tahun 2017 pada bulan Januari 2017. Peraturan tersebut mensyaratkan publikasi karya ilmiah kepada dosen setingkat lektor kepala dan profesor supaya dapat memperoleh tunjangan profesi. Melalui Permendikti tersebut, lektor kepala dan profesor diharuskan mempublikasikan karya ilmiahnya dalam rentang waktu tiga tahun. Dosen setingkat lektor kepala harus mempublikasikan tiga karya tulis pada jurnal nasional atau satu karya tulis pada jurnal internasional. Sedangkan bagi profesor, karya tulis yang harus

dipublikasikan setidaknya adalah jurnal setingkat internasional atau jurnal internasional bereputasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnal ilmiah di Indonesia.

Yuny mengaku tidak terbebani dengan tuntutan publikasi karya ilmiah tersebut. "Publikasi jurnal merupakan kewajiban bagi seorang dosen terlepas dari ada tidaknya pemberian insentif," ujarnya. Ia juga beranggapan bahwa peraturan ini dapat menjadi pendorong bagi perguruan tinggi di Indonesia agar lebih diakui di kancah internasional.

Senada dengan Yuny, Drs. Lambang Trijono, M.A., selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, mengatakan bahwa dirinya juga tidak keberatan. Lambang menuturkan bahwa selain telah terbiasa menulis, publikasi karya ilmiah berfungsi sebagai sarana memperkenalkan pemikirannya kepada masyarakat. Ia juga menyerukan agar pemerintah memberikan bantuan kepada dosen seiring kewajiban publikasi karya ilmiah. "Bila pemerintah mensyaratkan dosen untuk mengerjakan jurnal, maka fasilitasnya harus disediakan, seperti dana dan kenyamanan, karena menulis dan riset itu sulit," ujar Lambang.

Terkait fasilitas penulisan dan riset yang dibutuhkan oleh para dosen, Kepala Bidang Publikasi dan Jurnal Badan Publikasi dan Penerbitan (BPP), Tri Rini Nuringtyas, mengatakan bahwa UGM siap membantu. Nuning, begitu ia akrab disapa, menyebutkan salah satu program BPP yaitu pemberian insentif kepada dosen. Program tersebut berfungsi memberikan apresiasi kepada dosen yang telah melakukan publikasi ilmiah. Hal tersebut bertujuan supaya dosen terdorong untuk melakukan publikasi karya ilmiah. Ia menuturkan bahwa insentif yang berkisar antara 10 juta sampai 30 juta rupiah diberikan berdasarkan klasifikasi tingkatan jurnalnya.

Insentif ini dapat diperoleh dengan mengajukan proposal kepada BPP saat dosen mempublikasikan karya ilmiahnya. Proposal bantuan akan diperiksa untuk menentukan besaran insentif dan memastikan bahwa publikasi yang berkaitan tidak pernah didanai sebelumnya. Sebab menurut Nuning, pendanaan ganda tidak diperkenankan karena dapat membuat UGM berurusan dengan Badan Pengelola Keuangan. Pemberian insentif dilakukan ketika dosen yang bersangkutan telah mempublikasikan karya ilmiah.

Di samping itu, Nuning menyebutkan bahwa untuk meningkatkan publikasi jurnal tingkat internasional, UGM mengadakan empat konferensi internasional. Keempat konferensi itu adalah International Conference Science and Technology (ICST), International Conference Health Science (ICHS), International Conference Tropical Agriculture (ICTA) dan International Conference on South East Asia Studies (ICSEAS). Selain itu, UGM juga membantu fakultas yang ingin mengadakan konferensi sendiri. "Melalui konferensi-konferensi tersebut, UGM menjaring karya ilmiah untuk dipublikasikan oleh penerbit jurnal yang telah bekerja sama dengan UGM sebelumnya," kata Nuning.

**Pada tahun 2016, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnal yang dihasilkan dari penelitian di perguruan tinggi, pemerintah menaikkan dana riset hingga seratus persen. Harapannya, perguruan tinggi di Indonesia dapat masuk ke dalam daftar lima ratus perguruan tinggi terbaik di dunia.**

Menanggapi upaya pemerintah meningkatkan publikasi karya ilmiah di tingkat internasional, Yuny dan Lambang menganggap jurnal internasional belum tentu lebih baik dari jurnal nasional. Berdasarkan pengalaman Yuny, ia berpendapat bahwa publikasi jurnal di tingkat nasional itu belum tentu lebih mudah daripada di tingkat internasional. Menurutnya, di tingkat internasional sekalipun terdapat publikasi tanpa melalui penyuntingan maupun tinjauan ulang. Padahal di Indonesia, jurnal terakreditasi biasanya menerima publikasi setelah enam bulan melalui penyuntingan dan tinjauan ulang yang ketat. Hal tersebut juga dirasakan oleh Lambang yang menyebut jurnal internasional mengalami kemerosotan karena hanya mengejar kuantitas produk. Ia menambahkan bahwa perbedaan antara jurnal nasional dan internasional terdapat hanya pada penggunaan bahasa dan lingkup publikasi yang lebih luas.

Yuny dan Lambang berharap jurnal penelitian yang dipublikasikan dapat dibaca oleh masyarakat, khususnya mahasiswa. Keduanya sepakat bahwa membaca publikasi adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap penulis. Sayangnya, Yuny melihat bahwa tingkat keterbacaan jurnal tidak begitu tinggi meski UGM telah berlangganan jurnal internasional. "UGM telah menghabiskan biaya sampai 40 milyar untuk berlangganan jurnal, tetapi tingkat pembacanya, baik dari dosen maupun mahasiswa, masih relatif rendah," ucap Yuny.

Menanggapi hal tersebut, Nuning mengatakan bahwa BPP belum memiliki program untuk memperkenalkan jurnal-jurnal yang ada di UGM kepada mahasiswa. Ia mengaku bahwa untuk saat ini, BPP masih fokus pada usaha untuk meningkatkan kualitas jurnal-jurnal dari UGM. "Itu akan menjadi masukan bagi kami, supaya nantinya mahasiswa bisa ikut mengakses jurnal-jurnal yang ada di UGM," ujar Nuning.

Bagi Lambang, keterbacaan jurnal oleh masyarakat adalah tujuan utama dari publikasi. Ia berharap bahwa suatu saat, akses jurnal dapat semudah koran, sehingga masyarakat dapat membacanya untuk di waktu senggang. Dengan begitu, menurut Lambang, jurnal tidak hanya menjadi konsumsi kelompok akademisi, tetapi juga masyarakat umum dan pemerintah. **[Abil, Emi, Irfan]**

© Fifin/BAL

# Sebutir Debu

*Gunawan Tri Atmodjo*



*Selasa Pagi.*

Semesta terbuka. Aku melihat cakrawala dan kota yang kembali menemukan bentuknya. Di situ ada sebentuk udara yang di dalamnya aku juga ada. Aku telah kehilangan suara sejak kali pertama membuka mata. Dan, seperti biasa aku hidup hanya untuk menyaksikan kehidupan perempuan itu.

Sepanjang terang aku mengarus di kehidupannya. Dimulai dengan melihatnya mengenakan lensa kontak bening yang telah dua tahun ini digunakannya sebagai pengganti kacamata. Sebenarnya aku lebih senang bila melihatnya berkacamata, tetapi rupanya keinginanku tak sejalan dengannya. Barangkali kacamata itu dianggapnya mengurangi kecantikan atau mungkin pula dengan lensa kontak dia dapat melihat dengan lebih jelas. Namun sayang, meski sudah berlensa kontak, dia masih tetap tak dapat melihat wujudku, lebih tepatnya tak menyadari keberadaanku.

Gerak hidupku berpusar padanya. Dia seperti cahaya dan aku adalah pendarnya. Aku setia mengikutinya sepenuh cinta. Rutinitasnya adalah keajekanku juga. Dia akan merampungkan kegiatannya di rumah kurang lebih dua puluh menit sebelum mengendarai motor matiknya menuju kantor. Jarak antara rumah dan kantornya sekitar sepuluh kilometer. Selama perjalanan itu aku akan memboncengnya, memeluknya mesra, atau menyusup ke helmnya seraya tak henti-henti mendenyutkan getar asmara. Namun sayang, dia tak mampu merasakan debar cintaku.

Sesampainya di kantor, dia akan duduk di kursinya, merapikan mejanya lalu menyapa siapa saja yang datang, serta menunggu telepon berdering. Ya, sehari-hari dia memang bekerja sebagai *customer service*. Dia adalah wajah perusahaan setelah satpam, penyapa tamu sekaligus penerima telepon dari siapa saja lalu menyambungkannya kepada pihak yang berkepentingan. Terkadang, aku kerap cemburu bila mendengar percakapannya dengan orang-orang itu. Manakala begitu, keinginanku untuk memiliki suara kian menggebu. Aku hanya ingin berbisik ke telinganya bahwa aku mencintainya. Namun, sejauh ini aku hanyalah butir desir yang gagal dia tafsir.

Selepas menyalakan kembali harapan-harapan semu itu, aku rebah di jam mejanya yang berbentuk kucing dengan tangan yang terus melambai. Tubuhku terayun-ayun di tangan jam kucing itu. Mataku terus terpaku menatap wajahnya, menyaksikan bedak tipisnya luntur perlahan-lahan digerus angin AC. Setiap dua jam sekali dia akan ke kamar kecil dan tugas jaga telepon akan

diserahkan pada seorang satpam. Tentu saja aku tak mengikutinya ke kamar kecil. Aku masih punya cukup etika. Aku melarang diriku sendiri untuk mengikutinya ke sana meski itu adalah hal yang sungguh sepele bagiku. Begitu kembali ke meja kerja, bedak di wajahnya sudah kembali rata dan memesona. Dia senantiasa membenahi riasannya di kamar kecil. Aku hanya bisa berdecak kagum dengan kepiawaiannya berdandan. Berkali-kali kuucapkan puja-puji cinta kepadanya dan kebisuanku yang tanpa rona mengambang di angkasa kepalanya.

Ketika waktu istirahat tiba, dia akan pergi ke kantin. Seporsi mi ayam dan segelas jus jambu adalah menu makan siang favoritnya. Terkadang hal yang kubenci terjadi, beberapa lelaki, baik teman sekantor maupun dari lain kantor bergabung ke meja makannya. Biasanya, mereka akan berbual-bual dan coba merayunya. Rasanya ingin kutampar wajah mereka. Untungnya, perempuanku tak pernah menggubrisnya. Dia akan meladeni mereka seperlunya lalu bersegera menghabiskan makan siangnya. Aku bahagia ketika dia melakukan hal itu. Dia masih menjaga kemurnian kelakuannya dari godaan lelaki sialan.

Ketika dia menunaikan Salat Zuhur aku akan menempel di mukenanya. Mengikuti semua gerakan salatnya, menyertainya dengan doa-doa tertulus yang aku bisa. Aku sangat menikmati prosesi doa bersama ini dan percaya bahwa ritus doa ini akan mengikat kami selamanya. Aku dan doa memiliki kesamaan. Kami ada, tetapi tak kasat mata. Kami dapat menyentuh siapa saja tanpa terasa.

Seusai salat, dia akan bersandar sebentar di dinding musala. Dia akan terlelap sekitar sepuluh menit dalam posisi itu. Ketika dia mulai pulas, aku akan menempel di bulu matanya seraya berharap mengetahui mimpi-mimpinya dalam kesejenakan tidur itu. Ketika matanya kembali terbuka, aku melenting ke udara dan kurasakan tubuhku lebih bercahaya. Dia akan memperbaiki riasannya lagi sebelum kembali ke meja kerjanya. Aku mengikutinya dari belakang dengan rasa senang yang terus mengembang.

Pukul empat sore, jam kerjanya berakhir. Biasanya, dia tak langsung pulang tapi duduk-duduk sebentar di taman kota atau mampir ke toko roti dan membelikan bolu kukus untuk ibu dan adiknya. Rutinitas ringan sepulang kerja ini juga merupakan ritual perpisahan bagiku. Jatahku menyertainya hanya sebatas sore dan setelah itu aku akan kembali ke haribaan malam. Tak sabar menunggu saat pertemuan berikutnya.

Setiap kali tersapih darinya aku senantiasa bertanya-tanya, apa yang diperbuatnya ketika malam tiba? Terkadang rasa cemburu menyergapku dan berbagai dugaan buruk menyiksaku. Barangkali di waktu malam dia bercinta dengan kekasihnya. Saling melepas rindu yang terbentang saat siang datang. Tak jarang aku diserang insomnia karena memikirkan hal ini. Penenangku hanyalah kenyataan bahwa dia tak pernah menggubris rayuan tiap laki-laki yang mendekat ke meja makan siangnya.

Aku berdoa agar tidurnya senantiasa nyenyak dan di pagi hari kecantikannya merekah sempurna. Dan, akan kunikmati sepuasnya.

*Selasa Malam.*

Perempuan itu bergegas membilas tubuhnya. Dia punya seorang kekasih yang dicintainya sejak lama. Seorang kekasih tak kasat mata yang hanya bertandang sebagai suara. Kekasihnya berwujud bisikan dan meski begitu, perempuan itu merasa perlu menyambutnya dengan tubuh terwanginya.

Biasanya, sang kekasih akan menyambanginya pukul setengah delapan malam. Itu adalah waktu yang telah mereka sepakati. Masih tersedia cukup waktu bagi perempuan itu untuk mengoleskan parfum ke belakang telinganya. Beberapa kali kekasihnya absen menelepon dan menggantinya dengan pesan pendek. Lewat kata-kata berbumbu rindu, dia menerangkan tentang kesibukannya di belahan dunia lain yang belum bisa ditinggalkan. Jika sudah senggang, dia berjanji akan meneleponnya.

Tepat jam setengah delapan malam, ponsel perempuan itu berdering oleh panggilan dari kekasihnya. Mereka segera terlibat dalam percintaan wicara yang berlangsung hingga berjam-jam. Tampaknya hanya telinga orang yang sedang jatuh cinta yang mampu bertahan dalam kebisingan semacam itu.

Aku terjaga dengan kecemburuan membakar diriku. Mimpiku kali ini sungguh-sungguh durjana.

*Rabu Siang.*

Jika kau beruntung melihatnya ada sebutir debu yang nelangsa di udara. Dia benar-benar ingin menjelma suara untuk menyatakan keberadaannya, untuk mengatakan cinta pada seorang perempuan yang setia diikutinya. Jika kau mampu mendengar suaranya, dia bahkan rela dihancurkan kembali menjadi partikel yang lebih kecil dari wujudnya saat ini asalkan perasaan cintanya tersuarakan.

Akan tetapi, andaipun menyadari keberadaannya, kau tetap akan mengacuhkannnya. Dia hanya sebutir debu dengan kodrat diabaikan. Tentu kau akan lebih tertarik untuk mendekati perempuan cantik yang memesan semangkuk mi ayam dan segelas jus jambu yang tampak sendirian di meja kantin itu. Kau bisa berbual-bual dan bila mungkin sedikit merayunya hanya untuk menghangatkan makan siangmu.

*—Solo, 2015*

---

**Gunawan Tri Atmodjo** telah menulis buku kumcer *Sebuah Kecelakaan Suci*, *Sundari Keranjingan Puisi*, dan *Tuhan Tidak Makan Ikan*. Buku yang disebut terakhir dinobatkan sebagai salah satu buku prosa terbaik 2017 versi Kusala Sastra Khatulistiwa dan Majalah *Rolling Stone*.

# Rasialisasi Bagi yang Berbeda

Jalanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyajikan pemandangan beragam dari para pengendara. Ada pengendara yang berambut lurus, ada yang keriting. Ada yang bermata sipit, ada juga yang bermata besar. Ada yang berkulit legam, pun yang berwarna terang. Pemandangan jalan ini seolah menegaskan keistimewaan Yogyakarta sebagai tempat yang mempertemukan banyak manusia. Mereka pun hadir dengan berbagai kepentingan. Sebagian dari mereka mencari ilmu. Sebagian lagi merantau dari kampung halaman untuk mencari rupiah. Berdasarkan data dari Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (kependudukan.jogjaprov.go.id), terdapat sekitar 3,6 juta penduduk yang mendiami DIY pada 2016. Di dalam jumlah tersebut, terdapat pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun, di balik keberagaman masyarakat DIY, masih terdapat tindak diskriminasi kepada para pendatang. Salah satu diskriminasi ini dilakukan kepada pendatang dari Papua, terutama kalangan mahasiswa. Diskriminasi dilakukan dalam bentuk yang beragam dan oleh pihak yang beragam pula. Misalnya, pencarian rumah indekos atau tempat tinggal yang dipersulit oleh sang empu. Contoh lain, adanya beberapa usaha pengekangan kebebasan berpendapat, seperti yang terjadi di Taman Boulevard UGM pada Jumat (07-04) lalu. Saat itu, aksi bertajuk "Tutup Freeport dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua Barat", yang diikuti belasan anggota Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, dibubarkan

secara paksa oleh beberapa anggota kepolisian dan organisasi masyarakat.

Beberapa sumber menyatakan bahwa diskriminasi ini terjadi karena pendatang dari Papua lekat dengan stereotip susah diatur. Mahasiswa Papua dianggap tidak mengikuti tata krama masyarakat Jawa, khususnya DIY. Salah satu hal yang dianggap menyimpang adalah hobi mabuk-mabukan dan membuat kegaduhan. Biasanya, mereka yang gemar mabuk-mabukan adalah mahasiswa yang baru datang dan belum beradaptasi dengan budaya dan lingkungan DIY. Mereka masih membawa kebiasaan di Papua yang menggunakan minuman beralkohol untuk menghangatkan tubuh karena cuaca dingin akibat topografi wilayah yang terdiri atas pegunungan. Perilaku mabuk-mabukan bertentangan dengan *unggah-ungguh* di DIY.

Mahasiswa Papua juga dikenal dengan watak keras, tidak sesuai dengan budaya Jawa yang terkenal lembut dalam tutur dan laku. Mahasiswa Papua pun terkenal sebagai kaum yang tidak taat peraturan lalu lintas. Mereka seringkali berkendara tanpa surat-surat dan helm. Ada yang menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan helm sebagai bentuk perlawanan kepada pihak polisi yang mempersulit pengurusan surat-surat kendaraan bagi orang Papua.

Seorang pemikir dari Amerika Serikat, Falguni A. Sheth, memberikan pandangan terkait diskriminasi. Baginya, diskriminasi dapat dibagi menjadi bagian-bagian khusus, salah satunya adalah rasisme. Diskriminasi berupa rasisme bersinggungan dengan teorinya terkait pemisahan dalam sebuah populasi. Sheth menyebutkan bahwa salah satu alat untuk memisahkan orang-orang dalam masyarakat adalah ras. Menurutnya, ras bukanlah sebatas soal biologis ataupun konstruksi sosial. Lebih dari itu, ras adalah sebuah teknologi yang digunakan oleh *sovereign power* (pihak penguasa), untuk mengatur *the unruly*, yakni kaum yang sulit dikendalikan. Dengan kata lain, ras dapat dibentuk secara sengaja melalui proses yang disebut rasialisasi.

Bagi Sheth, rasialisasi merupakan cara untuk membagi populasi antara *yang mau dikendalikan* dan *yang tidak mau dikendalikan*. Rasialisasi dilakukan oleh para penguasa kepada kaum yang sulit dikendalikan sebab kehadiran kaum ini mengancam atau dianggap mengancam stabilitas. Ancaman ini dapat terlihat dari cara seseorang memperlihatkan nilai-nilai privatnya di publik atau dari caranya mengkritik aparatus negara dan stabilitas yang telah ada. Stabilitas yang dimaksud adalah tatanan yang menyediakan asumsi-asumsi yang telah dikenal dan diakui oleh mayoritas masyarakat. Dengan begitu, ketika kaum yang sulit dikendalikan tersebut merasa bahwa hak-haknya tidak terpenuhi atau dikecualikan dari masyarakat, mereka harus menyadari bahwa itulah konsekuensi dari sifat-sifat mereka yang sulit dan tidak mau diatur.

Sheth menyebutkan bahwa seseorang mengalami rasialisasi dikarenakan dua syarat. Pertama, ia punya ciri pembeda dari mayoritas populasi. Hal ini bisa ditandai dengan ciri fisik, seperti warna kulit dan jenis rambut; bahkan ciri yang tidak terlihat, seperti agama, seksualitas, ataupun pandangan politik. Kedua, ia lebih rentan dibanding mayoritas populasi agar lebih mudah dijauhkan dan didorong keluar dari populasi. Hal ini dapat ditandai dengan status sebagai pendatang, imigran, perkawinan campuran, dan lain sebagainya. Dengan adanya dua ciri ini, mayoritas populasi dapat dengan mudah mengatakan bahwa siapapun yang memiliki ciri tersebut pastilah membawa ancaman yang sama. Dari sana, mayoritas populasi dapat mengidentifikasinya sebagai kaum yang buruk dan salah. Maka dari itu, sebuah ras baru saja dibentuk secara sengaja.

Mahasiswa Papua di DIY memiliki syarat lengkap untuk dirasialisasikan. Mereka memiliki ciri fisik khas melanesia, yakni mempunyai kulit hitam dan rambut keriting. Mereka juga telah memiliki ciri kedua, sebab mereka adalah pendatang. Kedua ciri ini berbeda dengan ciri yang dimiliki mayoritas masyarakat DIY. Apabila beberapa oknum mahasiswa Papua mabuk-mabukan di suatu malam dan karenanya meracau dengan suara kencang, mereka telah bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat DIY. Dengan begitu, mereka pun dapat dikecualikan dari mayoritas dengan stigma bahwa semua mahasiswa Papua adalah pemabuk berat yang gemar meracau dan mengacau. Tindak diskriminasi pun secara otomatis mengikuti, yakni mereka akan sulit mendapatkan tempat tinggal. Padahal, tidak semua mahasiswa Papua adalah pemabuk. Namun, karena mereka telah terasialisasi, mereka akan teridentifikasi secara berbeda dengan mayoritas mahasiswa di DIY.

Jika ditarik ke contoh yang lebih luas, rasialisasi juga terjadi karena oknum masyarakat Papua memiliki pandangan politik yang berusaha menggugat stabilitas nasional. Misalnya, Gerakan Papua Merdeka yang menginginkan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua. Lantas, oknum yang menginginkan Papua untuk menentukan nasib sendiri dijadikan justifikasi oleh negara untuk mewacanakan bahwa semua orang Papua adalah kaum separatis. Padahal, tidak semua masyarakat Papua dapat digeneralisir seperti itu (dan apa salahnya penentuan nasib sendiri?). Oleh karena itu, mereka akan sulit untuk mengekspresikan keresahannya di depan publik karena dianggap akan mengganggu stabilitas negara.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi rasialisasi ini. Perlawanan terhadap rasialisasi dapat diekspresikan melalui tindakan kecil, dimulai dari refleksi yang mendalam. Kita dapat memulai dengan penelusuran pola-pola rasialisasi dalam masyarakat untuk menemukan akar permasalahannya, seperti yang dilakukan oleh Sheth. Kesimpulan yang diperoleh dari pola-pola tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki diri, baik dari pihak yang merasialisasi maupun yang terasialisasi. Rasialisasi tidak berawal dari ruang hampa.

Pola-pola rasialisasi akan selalu berubah seiring berjalannya waktu sehingga perlawanan terhadapnya harus dilakukan secara terus menerus dengan strategi yang terus berubah pula. Bagi Sheth, estetika juga menjadi salah satu jalan untuk melawan, karena kritik dapat dilampiaskan melalui hal-hal yang indah. Hal yang juga harus dilakukan adalah mencoba untuk selalu membaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Namun, selain mengaplikasikan peribahasa "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung", tetaplah kritis dan melawan. **[Penginterupsi]**

# Sikap Politik Intelektual Mahasiswa

© Nisa/BAL

Harian Kompas pada 20-04-1979 menerbitkan artikel berjudul "Normalisasi Kehidupan Kampus" yang ditulis oleh Menteri Pendidikan saat itu, Daoed Joesoef. Daoed menulis siaran penjelas tujuan berlakunya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang dilaksanakan menurut Surat Keputusan Nomor 037/U/1979. Tulisan itu juga berisi kritiknya terhadap aktivitas politik mahasiswa yang dinilai tidak membangkitkan kekuatan nalar individu dan kemampuan analisis-sintesis. Ia juga berujar jika hakikat mahasiswa bukanlah 'manusia rapat umum' tapi 'manusia penganalisa'.

Sejatinya apa yang ditulis Daoed merupakan respons pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan mahasiswa saat itu yang dianggap bandel. Pemerintah khawatir kampus ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Saat itu mahasiswa sering mengadakan unjuk rasa terhadap pemerintah, mulai dari seruan golput hingga memuncak pada peristiwa Malari pada 1974 yang berakhir dengan kerusuhan.

NKK/BKK merupakan bagian dari upaya depolitisasi yang dilakukan Orde Baru. Meski berdalih untuk mensterilkan dunia akademik dari tunggangan politik tertentu, pada pelaksanaannya NKK/BKK justru merepresi aktivitas politik mahasiswa secara menyeluruh. Hak-hak berserikat dibatasi dengan pelarangan gerakan ekstra kampus, pembubaran senat/dewan mahasiswa dan intimidasi terhadap mereka yang mengkritik pemerintah.

Seperti yang dijelaskan oleh Verena Beittinger-Lee, NKK/BKK merupakan contoh kecil depolitisasi secara langsung dan tidak langsung. Dalam bukunya *(Un)Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena* (2013: 42), ia menjelaskan bahwa Orde Baru menggunakan dua strategi dalam usaha depolitisasi masyarakat sipil. Pertama, secara langsung melalui paket lima undang-undang yang membatasi aktivitas partai politik. Strategi kedua secara tidak langsung melalui korporatisme, kooptasi dan hegemoni ideologi oleh pemerintah. Semua dilakukan dengan dalih mencegah ketidakstabilan sosial dan melindungi masyarakat dari manipulasi akibat kompetisi partai politik.

Menurut Yudi Latif dalam *Indonesian Muslim Intelegensia and Power* (2008: 374), saat dunia mahasiswa didepolitisasi, kegiatan mahasiswa di dalam kampus diarahkan ke organisasi intra kampus. Kampus hanya memfasilitasi kebutuhan rekreasi dan pengembangan profesionalisme. Aktivitas politik mahasiswa seperti kaderisasi gerakan ekstra kampus dan diskusi-diskusi kritis tak dapat dilakukan secara terang-terangan di kampus.
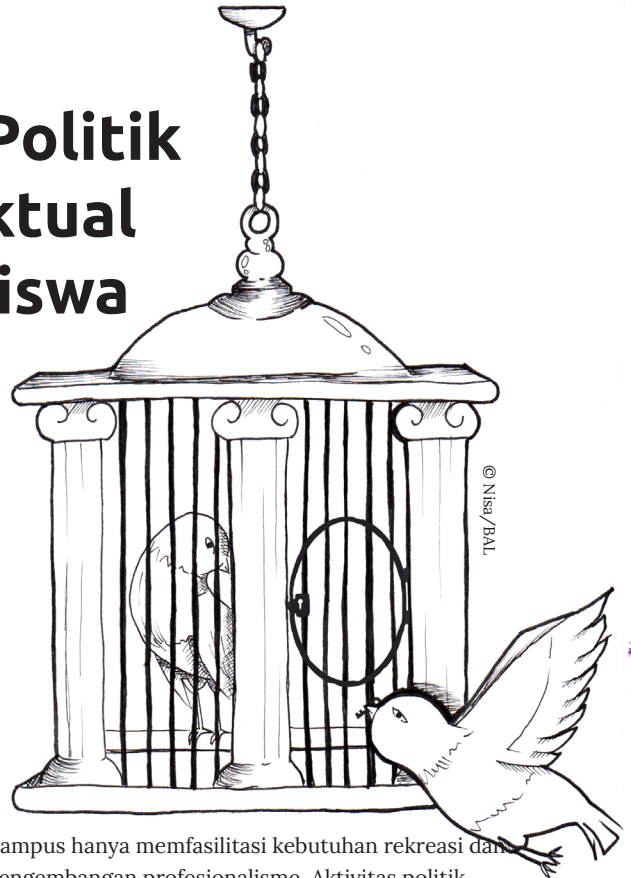
Depolitisasi ini membuat dunia universitas (khususnya universitas negeri) menjadi lembaga yang membebek rezim. Sebuah sikap politik yang menjadi bagian totalitas kekuasaan Orde Baru. Totalitas kekuasaan yang disebut Ben Anderson adalah segala upaya dan sarana untuk melanggengkan suatu kekuasaan lewat aturan formal, imajinasi pencapaian pembangunan, dan produksi kenikmatan hidup dalam suatu rezim serta wacana-wacana lain yang mendukung rezim.

Padahal, universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi seharusnya menjadi sebuah komunitas cendekiawan. Seperti yang disinggung Daniel Dhakidae dalam *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (2003: 15-16), hanya mereka yang terlibat dalam sistem diskursif politik pembebasanlah yang bisa disebut kaum cendekiawan. Sebuah diskursif politik yang berkomitmen pada kebenaran dan pembebasan terhadap penindasan. Ia juga mewujud dalam usaha-usaha penyingkapan penindasan yang dilakukan oleh siapapun terutama rezim. Daniel mencontohkan usaha tersebut seperti yang dilakukan sekumpulan cendekiawan Universitas Cornell yang menerbitkan A *Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia.* Laporan yang dikenal dengan "Cornell Paper" itu berisi laporan tentang pembantaian kader dan simpatisan PKI oleh militer.

Setelah dua dasawarsa reformasi toh represi terhadap aktivitas politik terus berlanjut. Gerakan ekstra kampus masih dilarang mendirikan sekretariat di dalam kampus dan mahasiswa dilarang melakukan aktivitas politik praktis. Alergi terhadap 'rapat umum' pun masih terjadi di banyak kampus. Hal ini mungkin disebabkan oleh deviasi politik dari sesuatu yang luhur ke politik busuk akibat praktik elit politik. Di sana, hanya dipenuhi ceracau gosip-gosip manipulasi kekuasaan, kampanye-kampanye dusta, bebal nalar anggota dewan dan impotensi partai politik.

Padahal, seperti yang disinggung Daniel, politik tak hanya lekat dengan aktivitas politik praktis atau perebutan kekuasaan. Senada dengan Daniel, politik menurut Sindhunata dalam pengantar buku *Menjadi Generasi Pasca-Indonesia* (2005:17), ialah segala ikhtiar yang tumbuh dari rasa ikut memiliki segala suka duka dan hal ihwal masyarakat, dan karenanya ikut bertanggung jawab serta menyumbang demi kesejahteraan umum. Definisi ini bisa dijadikan oase di tengah narasi elit perpolitikan Indonesia yang memuakkan. Maka, politik tidak seharusnya dibatasi di dunia akademis.

Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Balairung UGM (selanjutnya disebut Balairung) sebagai pers mahasiswa mencoba untuk terus aktif dalam diskursif politik yang disinggung Daniel dan Sindhunata. Di tengah meningkatnya beban studi awaknya, Balairung mencoba untuk terus menelurkan wacana-wacana kritis sebagai sikap politiknya. Ia terus hadir dengan komitmen terhadap kebenaran dan keberpihakan pada mereka yang tertindas. Di Balairung, kami meleburkan sekat-sekat disiplin studi dan berpegang teguh pada tugas intelektual agar tak larut dalam mimpi-mimpi tentang karier atau kultus individu lainnya.

Di usianya yang menjelang 32 tahun, Balairung memanifestasikan sikap politiknya lewat tiga produk yang dihasilkan sebagai pers komunitas dan wacana. Saat ini Balairung memiliki situs daring *balairungpress.com*, majalah edisi khusus mahasiswa baru dan jurnal mahasiswa. Ke depan, harapannya kami dapat terus menjadi media alternatif untuk berpolemik dengan konten yang selaras atau bahkan melampaui diskursus klise kemahasiswaan.

**Pers mahasiswa dengan segala dinamika kehidupan perkuliahan awaknya, harus hadir terdepan menjaga kewarasan tersebut di dunia kampus**

Majalah Balairung edisi 53 yang fisiknya sedang pembaca pegang ini, dahulu bernama Balkon Spesial. Tema yang diangkat tidak melulu perihal kehidupan akademik. Tidak melulu soal informasi perkuliahan atau tips-tips mahasiswa berprestasi, tapi meluas ke dunia di mana 'kehidupan akademik' itu bekembang, yakni kehidupan kemasyarakatan itu sendiri. Hal ini biasa dilakukan Balairung dalam memproduksi terbitannya. Sebuah laku agar dunia mahasiswa yang lekat dengan aktivitas berpikir tersebut—seperti yang dipuisikan oleh Rendra—tak lepas dari masalah kehidupan dan jelas maksud baiknya untuk siapa.

Pada akhirnya, apa yang Balairung lakukan adalah sebuah tugas pers dan intelektual secara umum. Sebuah usaha bersama-sama dengan pembacanya menciptakan iklim intelektual dan politik yang sehat serta penuh kewarasan. Pers mahasiswa dengan segala dinamika kehidupan perkuliahan awaknya, harus hadir terdepan menjaga kewarasan tersebut di dunia kampus. Ia tak boleh ikut larut dalam hegemoni mimpi-mimpi yang diwacanakan para pejabat kampus. Pers mahasiswa tak boleh berhenti hanya pada kegiatan siar-menyiar peristiwa, tapi ia harus menganalisis peristiwa hingga tersingkap ihwal yang seharusnya diketahui khalayak.

Kaum intelektual bukanlah ia yang larut dalam modal-modal simbolik seperti jas almamater, akreditasi departemen, atau slogan-slogan *mbois* seperti *worldclass university*. Namun, ia yang mampu mengolah dan mengartikulasikan modal-modal simbolik tersebut menjadi laku pembebasan. Bukan pujangga yang menyepi di puncak gunung, tapi ia yang ikut turun menyatu dan turut merasakan derita kehidupan masyarakat.

Selamat datang mahasiswa biasa di kampus biasa-biasa saja!

**[Penjaga Dapur: Fazrin Haerussaleh]**
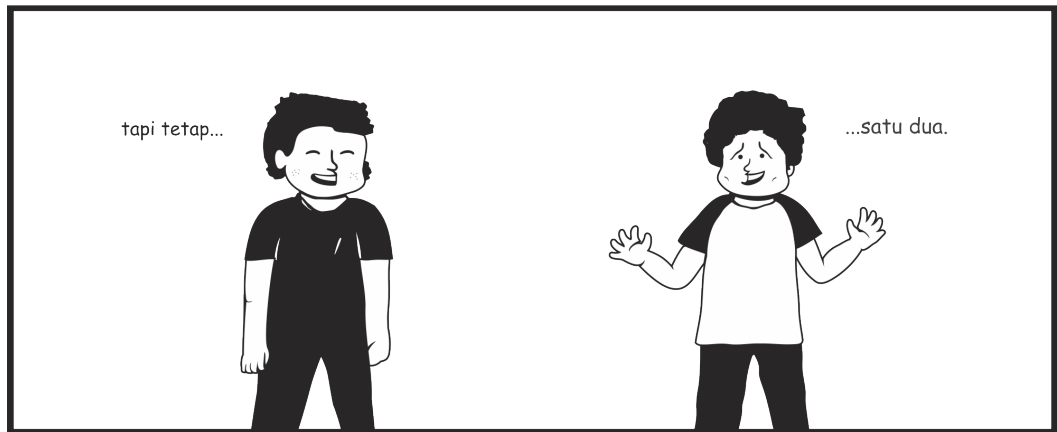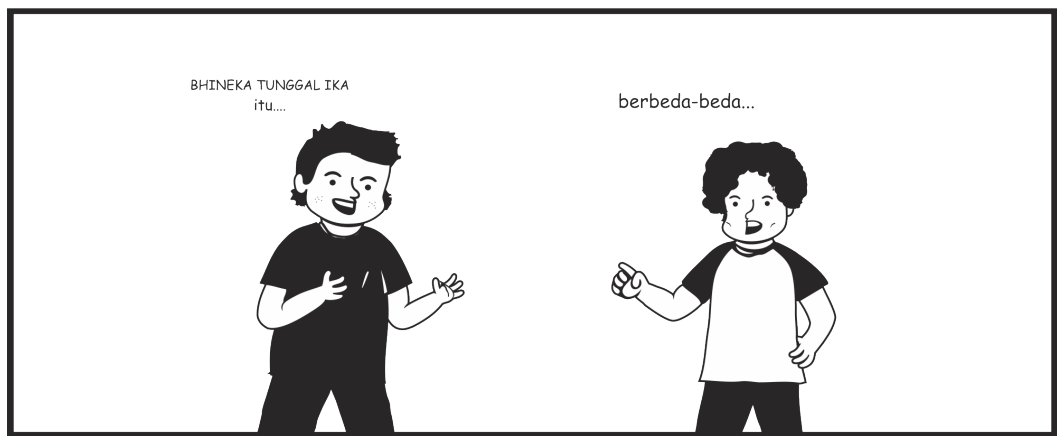
+ hubungan antarwarga asli Papua memanglah sangat dekat karena rasa kekeluargaan yang besar dan nasib yang sama sebagai sesama perantau di kota pelajar
- cara menjaga kebersamaan yang terkadang kurang pas dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan resah masyarakat

4

3

2

1

# hitung mundur

© Rusmul/BAL